

MUHAMMAD MIFTAH

DISERTASI



# POLITIK KEBIJAKAN MODERASI BERAGAMA

RESEPSI, NEGOSIASI DAN MODEL IMPLEMENTASI  
DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

POLITIK KEBIJAKAN MODERASI BERAGAMA  
RESEPSI, NEGOSIASI DAN MODEL IMPLEMENTASI DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

STATE ISLAM UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**POLITIK KEBIJAKAN MODERASI BERAGAMA  
RESEPSI, NEGOSIASI DAN MODEL IMPLEMENTASI DI  
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM**



Oleh:

**MUHAMMAD MIFTAH**  
NIM.18300016024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
DISERTASI  
YOGYAKARTA

**PROGRAM DOKTORAL STUDI ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2022**

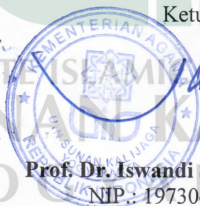
## PENGESAHAN

Judul Disertasi : POLITIK KEBIJAKAN MODERASI BERAGAMA  
RESEPSI, NEGOSIASI DAN MODEL IMPLEMENTASI DI  
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
Ditulis oleh : Muhammad Miftah  
NIM : 18300016024  
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam  
Konsentrasi : Kependidikan Islam

**Telah dapat diterima  
Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)  
Dalam Bidang Studi Islam**

Yogyakarta, 27 Januari 2022

An. Rektor/  
Ketua Sidang.



**Prof. Dr. Iswandi Syahputra, S.Ag., M.Si.**  
NIP. : 19730423 200501 1 006

## YUDISIUM

### BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP (PADA TANGGAL 22 NOVEMBER 2021), DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM SIDANG UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS, **MUHAMMAD MIFTAH** NOMOR INDUK: **18300016024** LAHIR DI **BOYOLALI**, TANGGAL **22 MEI 1989**,

**LULUS DENGAN PREDIKAT :**

**PUJIAN (CUM LAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN\*\***

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR **STUDI ISLAM** KONSENTRASI **KEPENDIDIKAN ISLAM** DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

**\*SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE-818.**

YOGYAKARTA, 26 JANUARI 2022

An. REKTOR /  
KETUA SIDANG,











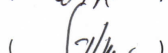
**Prof. Dr. Iswandi Syahputra, S.Ag., M.Si.**

NIP.: 19730423 200501 1 006

**\*\* CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN**



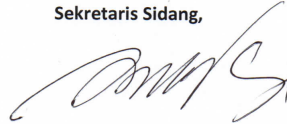
**DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI  
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

Nama Promovendus	: Muhammad Miftah	
NIM	: 18300016024	
Judul Disertasi	: POLITIK KEBIJAKAN MODERASI BERAGAMA RESEPSI, NEGOSIASI DAN MODEL IMPLEMENTASI DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM	
Ketua Sidang	: Prof. Dr. Iswandi Syahputra, S.Ag., M.Si.	
Sekretaris Sidang	: H. Ahmad Muttaqin, M.Ag., M.A., Ph.D.	
Anggota	: 1. Prof. Dr. H. Sutrisno, M.Ag. (Promotor/Penguji)	
	: 2. Dr. H. Hamdan Daulay, M.Si., M.A. (Promotor/Penguji)	
	: 3. Prof. Drs. HM Sirozi, M.A., Ph.D. (Penguji)	
	: 4. Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A. (Penguji)	
	: 5. Dr. H. Zainudin, M.Ag. (Penguji)	
	: 6. Prof. Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd. (Penguji)	

Di Ujikan di Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022

Tempat : Aula Lt. 1 Gd. Pascasajana UIN Sunan Kalijaga  
Waktu : Pukul 13.00 WIB. S.d. Selesai  
Hasil / Nilai (IPK) : 3.90  
Predikat Kelulusan : Pujian (*Cum laude*)// Sangat Memuaskan/ Memuaskan

Sekretaris Sidang,



H. Ahmad Muttaqin, M.Ag., M.A., Ph.D.  
NIP. 19720414 199903 1 002

**PERNYATAAN KEASLIAN DAN  
BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Miftah, S. Pd.I, M.Pd.I

NIM : 18300016024

Program/ Prodi : Doktor (S3) Studi Islam

Konsentrasi : Kependidikan Islam

Menyatakan bahwa naskah **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian saya/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, Desember 2021

Saya yang menyatakan



Muhammad Miftah, S.Pd.I, M.Pd.I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA




**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UIN SUNAN KALIJAGA**  
**PASCASARJANA**

## **PENGESAHAN PROMOTOR**

1. Promotor : Prof. Dr. Sutrisno, M. Ag

(  )

2. Promotor : Dr. Hamdan Daulay, M. Si., M.A

(  )

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY**  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
**Direktur Pascasarjana**  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum, wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi yang berjudul:

**POLITIK KEBIJAKAN MODERASI BERAGAMA RESEPSI,  
NEGOSIASI DAN MODEL IMPLEMENTASIDI PERGURUAN  
TINGGI KEAGAMAAN ISLAM**

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Miftah  
NIM : 18300016024  
Program/ Prodi : Doktor (S3) Studi Islam  
Konsentrasi : Kependidikan Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada hari Senin tanggal 22 November 2021, Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

*Wassalamu'alaikum wr, wb*

Yogyakarta, 23 Desember 2022  
Penguji,



Prof. Dr. Sutrisno, M. Ag

## NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
**Direktur Pascasarjana**  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum, wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi yang berjudul:

**POLITIK KEBIJAKAN MODERASI BERAGAMA  
RESEPSI, NEGOSIASI DAN MODEL IMPLEMENTASI DI  
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM**

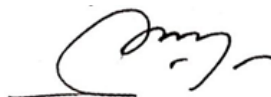
Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Miftah  
NIM : 18300016024  
Program/ Prodi : Doktor (S3) Studi Islam  
Konsentrasi : Kependidikan Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada hari Senin tanggal 22 November 2021, Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

*Wassalamu'alaikum wr, wb*

Yogyakarta, 22 Desember 2021  
Penguji,



Dr. Hamdan Daulay, M. Si., M.A

## NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
**Direktur Pascasarjana**  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum, wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi yang berjudul:

**POLITIK KEBIJAKAN MODERASI BERAGAMA  
RESEPSI, NEGOSIASI DAN MODEL IMPLEMENTASI DI  
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM**

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Miftah,  
NIM : 18300016024  
Program/ Prodi : Doktor (S3) Studi Islam  
Konsentrasi : Kependidikan Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada hari Senin tanggal 22 November 2021, Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

*Wassalamu'alaikum wr, wb*

Palembang, 27 Desember 2021  
Penguji,



Prof. M. Sirozi, Ph. D



## NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
**Direktur Pascasarjana**  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum, wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi yang berjudul:

**POLITIK KEBIJAKAN MODERASI BERAGAMA  
RESEPSI, NEGOSIASI DAN MODEL IMPLEMENTASI DI  
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM**

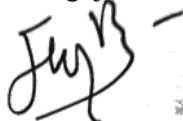
Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Miftah  
NIM : 18300016024  
Program/ Prodi : Doktor (S3) Studi Islam  
Konsentrasi : Kependidikan Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada hari Senin tanggal 22 November 2021, Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

*Wassalamu'alaikum wr, wb*

Yogyakarta, 24 Desember 2021  
Penguji,



Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A

## NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
**Direktur Pascasarjana**  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum, wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi yang berjudul:

**POLITIK KEBIJAKAN MODERASI BERAGAMA  
RESEPSI, NEGOSIASI DAN MODEL IMPLEMENTASI DI  
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM**

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Miftah  
NIM : 18300016024  
Program/ Prodi : Doktor (S3) Studi Islam  
Konsentrasi : Kependidikan Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada hari Senin tanggal 22 November 2021, Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

*Wassalamu'alaikum wr, wb*

Yogyakarta, 22 Desember 2021  
Penguji,



Dr. H. Zainudin, M.Ag

## ABSTRAK

Kebijakan moderasi beragama menjadi bagian dari kebijakan publik secara legalitas tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menjadi acuan dalam pengembangan bangsa dalam kurun waktu lima tahun. Kementerian Agama sebagai *leading sector* dalam kebijakan moderasi beragama secara nasional mempunyai kewajiban untuk menerjemahkan kebijakan moderasi beragama di lingkungan Kementerian Agama mulai dari menarasikan, menerjemahkan dan mengaplikasikan nilai moderasi beragama dalam pelbagai satuan kerja dan unit yang dimilikinya. Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam menjadi bagian penting dalam mengawal dan mengaktualisasikan moderasi beragama di lembaganya mempunyai kewenangan dan keleluasan dalam mengaktualisasikan moderasi beragama di lembaga yang dimilikinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan *field research* di tiga perguruan tinggi keagamaan Islam, yaitu UIN Walisongo Semarang, IAIN Surakarta dan IAIN Kudus, metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, validasi data dengan triangulasi data, proses analisis data menggunakan *interactive model* Miles dan Huberman dengan cara *collection, reduction, display* dan terakhir *verification*. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengungkap dan menemukan negosiasi kebijakan dalam produk kebijakan moderasi beragama di perguruan tinggi keagamaan Islam, serta menangkap pola model internalisasi nilai moderasi beragama di perguruan tinggi keagamaan Islam. Hasil dari penelitian ini ialah kebijakan moderasi beragama memberikan peluang yang seluas-luasnya dalam menginternalisasikan moderasi beragama atau model *paternalism libertarian* yaitu memberikan peluang kepada objek untuk melewati hukum atau beberapa bentuk aturan lain untuk bertindak sesuai dengan kondisi dan keadaan yang dimilikinya, atau mencoba memengaruhi pihak yang terpengaruh sehingga ia memilih pilihan yang lebih baik, tanpa memaksa mereka berbuat sesuatu atau tanpa memaksa mereka melakukan sesuatu atau mencegah mereka melakukan sesuatu. Sedangkan dalam dimensi internalisasi nilai-nilai moderasi beragama, perguruan tinggi keagamaan Islam dengan mendesain kegiatan tri darma perguruan tinggi mulai dari pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di konsep dengan nilai-nilai dan asas moderasi beragama.

**Kata Kunci:** Politik, Pendidikan Tinggi, Moderasi Beragama, Negosiasi Kebijakan, Model Implementasi.

## ABSTRACT

Printed in the National Mid-term Development Plan of 2020-2024, Religious Moderation Policy legitimately became a public policy since then. The plan was a five-year plan and a nation development guideline. A leading sector of nationwide religious moderation, the Ministry of Religion is responsible for interpreting – from narrating, interpreting to applying the moderation values in every unit – the policy in its environment. Having an important role to guard and actualize the moderation within their environment, Islamic Religious Colleges own an authority and freedom to do so. This qualitative study carried field research out in three Islamic Religious Colleges, namely UIN Walisongo of Semarang, IAIN Surakarta and IAIN Kudus. Data were collected through interview, observation, and documentation; validated using data triangulation; and analyzed with Milesdan Huberman interactive model by collection, reduction, display, and verification. The study aims at revealing and discovering if there is a negotiation in the religious moderation policy in Islamic Religious Colleges; it also tries to grab the pattern of internalizing model of the moderation values in Islamic Religious Colleges. The results show that the religious moderation policy gives wide-open opportunities of internalizing religious moderation or libertarian paternalism model where the object is given opportunities to go beyond the laws and regulations and act according to the situation the colleges face, or is trying to influence those who are affected so they take better choices without making them do something nor keeping them from doing it. Whereas in the internalizing religious moderation values dimension, Islamic Religious Colleges design the college three-dharmas from teaching, research and dedicate to community using religious values or principles.

**Key words:** Politics, College, Religious Moderation, Policy Negotiation, Implementation Model

## ملخص الرسالة

سياسة الوساطة هي جزء من السياسة العامة الواردة قانونيا في خطة التنمية الوطنية متوسطة الأجل 2020-2024، والتي تعد مرجعا في تطوير الأمة في غضون فترة خمس سنوات. ووزارة الشؤون الدينية بصفتها القطاع الرائد في سياسات الوساطة على الصعيد الوطني تلتزم بترجمة سياسات الوساطة داخل الوزارة بدءا من سرد وترجمة وتطبيق قيم الوساطة الدينية في وحدات العمل المختلفة. تعتبر الجامعات الإسلامية جزءا مهما في حراسة وتفعيل الوساطة الدينية، وهي تمتلك السلطة والمرونة في تفعيل الوساطة الدينية في مؤسساتها.

هذه الرسالة هي من الرسائل المعتمدة على منهج نوعي، وقام الباحث بدراسة ميدانية في ثلاث جامعات إسلامية؛ جامعة والي سونجو الإسلامية الحكومية بسمارانج و الجامعة الإسلامية الحكومية بسوراكارتا، والجامعة الإسلامية الحكومية بقدوس. جمع الباحث البيانات عن طريق المقابلة والملاحظة والتوثيق. وتحقق من صحة البيانات عن طريق تثليث البيانات. أما بالنسبة لعملية تحليل البيانات فاستخدم الباحث نموذجا تفاعليا عند مايلز وهوبرمان (Miles and Huberman) عن طريق الجمع والتخفيض والعرض والتحقق.

هدفت هذه الدراسة إلى اكتشاف وإيجاد المفاوضات السياسية في نتاج سياسات الوساطة في الجامعات الإسلامية ومعرفة أنماط نماذج الاستيعاب الداخلي لقيم الوساطة في الجامعات الإسلامية. وتوصلت هذه الرسالة إلى أن سياسة الوساطة توفر أوسع فرص لاستيعاب الوساطة أو نموذج الأبوية التحررية وهو توفير الفرص لتمرير القانون أو أي أنواع أخرى من التنظيم للعمل وفقا لظروف أو محاولة التأثير على الآخر ليختار أفضل الخيارات دون إجباره على فعل شيء أو منعه منه. أما في بُعد الاستيعاب الداخلي لقيم الوساطة الدينية، فقامت الجامعات الإسلامية بتصميم أنشطة ثلاثة التزامات للجامعات الإسلامية بدءا من التدريس والبحث وتقديم خدمات للمجتمع متماشية مع قيم ومبادئ الوساطة.

**الكلمات الأساسية:** السياسة، الجامعة، الوساطة، المفاوضات السياسية، نموذج التنفيذ

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	š	es (dengan titik atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zā'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	Žā'	ž	zet (dengan titik bawah)



Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Ghain	Gh	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

Kata Arab	Ditulis
مُدَّةٌ مُتَعَدِّدَةٌ	<i>muddah muta'ddidah</i>
رَجُلٌ مُتَفَنَّيْنٌ مُتَعَيِّنٌ	<i>rajul mutafannin muta'ayyin</i>

### C. Vokal Pendek

Ḥarakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Fathah	A	من نصر وقتل	<i>man naṣar wa qatal</i>
Kasrah	I	كم من فئة	<i>kamm min fi'ah</i>
Ḍammah	U	سدس وخميس وثلاث	<i>sudus wa khumus wa ṣulus</i>

## D. Vokal Panjang

<i>Ḥarakah</i>	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fathah</i>	Ā	فَتَّاح رَزَّاق مَنَّان	<i>fattāḥ razzāq mannān</i>
<i>Kasrah</i>	Ī	مَسْكِين وَفَقِير	<i>miskīn wa faqīr</i>
<i>Dammah</i>	Ū	دُخُول وَخُرُوج	<i>dukhūl wa khurūj</i>

## E. Huruf Diftong

Kasus	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fathah</i> bertemu <i>wāw</i> mati	Aw	مولود	<i>Maulūd</i>
<i>Fathah</i> bertemu <i>yā'</i> mati	Ai	مهيمين	<i>Muhaimin</i>

## F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata Arab	Ditulis
أَنْتُمْ	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ لِلْكَافِرِينَ	<i>u'iddat li al-kāfirīn</i>
لَعْنٌ شَكَرْتُمْ	<i>la'in syakartum</i>
إِعَانَةُ الطَّالِبِينَ	<i>i'ānah at-tālibīn</i>

## G. Huruf *Tā' Marbūṭah*

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf "h".

Kata Arab	Ditulis
زَوْجَةٌ جَزِيلَةٌ	<i>zaujah jazīlah</i>
جَزْيَةٌ مُحَدَّدَةٌ	<i>jizyah muḥaddadah</i>

Keterangan:

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti oleh kata sandang “*al-*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “*h*”.

Kata Arab	Ditulis
تكملة المجموع	<i>takmilah al-majmū‘</i>
حلاوة الحبة	<i>ḥalāwah al-maḥabbah</i>

2. Bila *tā’ marbūtah* hidup atau dengan *ḥarakah* (*fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah*), maka ditulis dengan “*t*” berikut huruf vokal yang relevan.

Kata Arab	Ditulis
زكاة الفطر	<i>zakātu al-fiṭri</i>
إلى حضرة المصطفى	<i>ilā ḥaḍrati al-muṣṭafā</i>
جلالة العلماء	<i>jalālata al-‘ulamā’</i>

## H. Kata Sandang *alif* dan *lām* atau “*al-*”

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*:

Kata Arab	Ditulis
بحث المسائل	<i>baḥṣ al-masā’il</i>
المحصول للغزالي	<i>al-maḥṣūl li al-Ghazālī</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf “*l*” (*el*)-nya.

Kata Arab	Ditulis
إعانة الطالبين	<i>i‘ānah aṭ-ṭālibīn</i>
الرسالة للشافعي	<i>ar-risālah li asy-Syāfi‘ī</i>
شذرات الذهب	<i>syazarāt az-ḡahab</i>

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirrabilalamin*, segala puji hanya milik Allah S.W.T., yang telah menganugerahi limpahan karunia nikmat, dan keselamatan kepada penulis, sehingga penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir dari studi program doktoral Studi Islam dengan Konsentrasi Kependidikan Islam (KI) di Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat teriring salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan panutan kita nabi agung Muhammad S.A.W., para sahabat, dan para pengikut setianya hingga akhir zaman. terselesainya studi dan kepenulisan disertasi yang berjudul “POLITIK KEBIJAKAN MODERASI BERAGAMA Resepsi, Negosiasi Dan Model Implementasi Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam” melibatkan banyak pihak yang berperan dalam penyelesaian disertasi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa syukur dan terimakasih yang mendalam kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dan membantu penyelesaian studi, keterbatasan penulis untuk menyebutkan satu-persatu pihak-pihak yang membantu dalam studi tanpa ada perasaan untuk mengecilkan peran-peran yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

*Pertama*, rasa terimakasih yang tiada hingga penulis ucapkan kepada Kementerian Agama RI, atas kesempatan dan kepercayaannya yang diberikan kepada penulis melalui program MORA 5000 Doktor. Dengan program ini penulis dapat menyelesaikan program studi doktoral di UIN Sunan Kalijaga dengan penuh semangat dan giat untuk berusaha menyelesaikan studi dengan tepat waktu.

*Kedua*, rasa terimakasih yang kedua penulis ucapkan kepada kedua promotor penulis yaitu; Prof. Dr. Sutrisno, M.Ag dan Dr. Hamdan Daulay, M.Si, yang telah banyak membantu, mnegarahkan dan membimbing penulis dalam penelitian, dengan mengatur pola kritis penelitian sehingga tersusunnya hasil penelitian disertasi ini secara sistematis, argumentatif, dan konherensif. Walaupun dimasa pandemi beliau-beliau tetap sabar membimbing dan mengarahkan penulis agar penelitian yang dilakukan dapat maksimal dan selesai tepat pada waktunya.

*Ketiga*, rasa terimakasih penulis ucapkan kepada segenap dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yaitu; Prof. Noorhaidi Hasan, MA., PhD; Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah; Prof. Dr. Abdul Rahman Assegaf, M. Ag; Prof. Dr. Marhumah, M.Pd; Prof. Dr. H. Hamruni, M. Si; Prof Syafa'atun Almirzanah, Ph.D; Dr. Alim Roswanto, M.Ag; Ahmad Rafiq, MA, Ph. D; Fatimah Husein, MA., Ph. D; Dr. Karwadi, S.Ag, M. Ag; Dr. Radjasa, M.Si; Dr. Eva Latipah, S. Ag; Dr. Muqowim, M. Ag; Atas ilmu yang diberikan selama proses studi program doktoral di UIN Sunan Kalijaga, sehingga penulois terbuka wacana kritis dan terbangun jiwa akademik dalam menyelesaikan studi program doktoral. *Keempat*, rasa terimakasih penulis ucapkan kepada segenap pimpinan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, terutama Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA. Selaku Rektor; dan Prof Abdul Mustaqim, S. Ag., M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

*Kelima*, rasa terimakasih penulis ucapkan kepada segenap pimpinan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus terutama Dr. H. Mundakir, M.Ag. selaku Rektor yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan studi S3 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melalui program Mora 5000 Doktor yang diseleInggarkan Kementerian Agama RI pada tahun 2018, sehingga memungkinkan penulis berada pada posisi seperti sekarang ini. *Keenam* rasa terimakasih penulis ucapkan kepada rekan-rekan seperjuangan S-3 Program Studi Islam dalam Konsentrasi Kependidikan Islam dan teman-teman seperjuangan pada konsentrasi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD).

*Ketujuh*, rasa terimakasih penulis ucapkan kepada komunitas Kajian Ahad Pagi, yang di pimpin Prof. Dr. Sutrisno, M.Ag dan Dr. Sumedi, M.Ag yang selalu aktif dan disiplin menyelenggarakan kajian dan diskusi setiap ahad pagi melalui media aplikasi zoom, sebagai media kajian dan bimbingan saat penulis menyelesaikan penulisan disertasi ini. Penulis merasa sangat terbantu akan adanya forum ini mengingat keadaan pandemic yang membatasi mobilitas penulis.

*Kedelapan*, rasa terimakasih yang mendalam penulis ucapkan kepada orang-orang yang penulis sangat cintai yaitu kedua orang tua penulis beliau Bapak H. Mukharim dan Emak Nafsiyah dan ibu mertua ibu Siti Wangidah, S. Pd. Kemudian yang terkasih istri penulis

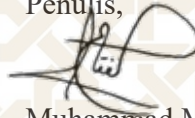
Fitri Erning Kurniawati, S.Pd. beserta tiga putra-putri kami Fatikha Azzahra Ilma (7 Tahun), Fatkhan Azril Ilham (5 Tahun), Fattah Akmal Irfani (1 Tahun), yang menjadi sumber motivasi dan pelipur lara dalam menyelesaikan tugas belajar, dan mendorong terselesaikannya tugas belajar dengan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Terakhir, penulis sangat berharap semoga dengan karya yang sangat sederhana ini dapat memberi kemanfaatan khususnya bagi penulis dan umumnya kepada para akademisi yang berkecimpung dalam dunia pendidikan tinggi, terlebih kepada masyarakat luas semoga dapat bermanfaat dan menjadi ladang amal bagi penulis di kemudian hari. *Amin..*

Yogyakarta,

Januari 2022

Penulis,



Muhammad Miftah, S.Pd.I, M.Pd.I



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Pengesahan Rektor.....	ii
Yudisium .....	iii
Dewan Penguji Ujian Terbuka Promosi Doktor .....	iv
Pernyataan Keaslian dan Bebas Plagiarisme .....	v
Pengesahan Promotor.....	vi
Nota Dinas .....	vii
Abstrak.....	xii
Pedoman Transliterasi Arab-Latih .....	xv
Kata Pengantar .....	xix
Daftar Isi .....	xxii
Daftar Tabel.....	xxvi
Daftar Gambar .....	xxvii
Daftar Lampiran .....	xxviii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat.....	10
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Kerangka Teoritis .....	23
G. Metode Penelitian.....	25
H. Sistematika Pembahasan .....	33
<b>BAB II PENDIDIKAN TINGGI ISLAM, SEJARAH, POLITIK DAN DINAMIKA PERKEMBANGANNYA.....</b>	<b>25</b>
A. Politik Pendidikan Tinggi Islam Pasca Kemerdekaan.....	36
1. Historisitas dan Perkembangan Pendidikan Tinggi Islam .....	36
2. Dinamika Perkembangan Lembaga Pendidikan Tinggi Islam .....	40
3. Politik Pendidikan Tinggi Islam Masa Orde Lama.....	45

B. Politik Pendidikan Tinggi Islam Masa Orde Baru .....	53
1. Potret Pendidikan Islam Masa Orde Baru.....	53
2. Dinamika Perkembangan Pendidikan Tinggi Islam Masa Orde Baru (1965-1998) .....	57
3. Pergulatan Politik dan Produk Kebijakan Pendidikan Tinggi Islam di Masa Orde Baru.....	60
C. Politik Pendidikan Tinggi Islam Era Reformasi.....	65
1. Perkembangan Lembaga Pendidikan Tinggi Islam Era Reformasi.....	65
2. Pendidikan Tinggi Islam, Politik dan Dinamika Sosial .....	72
3. Dinamika Pendidikan Tinggi Islam Tantangan dan Peluang di Era Disruptif.....	79

**BAB III MODERASI BERAGAMA, KEBIJAKAN PUBLIK,  
DAN DINAMIKA POLITIK IDENTITAS DI  
INDONESIA .....87**

A. Urgensi Moderasi Beragama .....	88
1. Konsep Moderasi Beragama .....	88
2. Prinsip Dasar Moderasi Beragama.....	92
3. Landasan Hukum Moderasi Beragama .....	95
4. Indikator Moderasi Beragama.....	97
5. Peta Jalan Moderasi Beragama .....	102
B. Urgensi Kebijakan Publik Dalam Bidang Pendidikan .....	103
1. Kebijakan Publik.....	103
2. Politik Demokratik Dalam Kebijakan Publik ....	108
3. Dimensi Keadilan Sosial dalam Kebijakan Pendidikan Tinggi .....	112
C. Politik Identitas dan Tanggung Jawab Negara .....	114
1. Konsep Politik Identitas .....	114
2. Ruang Lingkup Politik Identitas .....	121
3. Dinamika Politik Identitas di Indonesia.....	123

**BAB IV MODERASI BERAGAMA, RESEPSI, NEGOSIASI  
DAN NEGOSIASI POLITIK DI PENDIDIKAN  
TINGGI KEAGAMAAN ISLAM.....129**

A. Moderasi Beragama dan Tantangan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.....	130
--	-----

1.	Tantangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam Mengembangkan Moderasi Beragama di Indonesia .....	130
2.	Potret Rumah Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam .....	137
B.	Kebijakan Moderasi Beragama di Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam .....	149
1.	Idealitas Kebijakan Moderasi Beragama di Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam .....	143
2.	Resepsi Kebijakan Moderasi Beragama Di Pendidikan.....	149
3.	Tinggi Keagamaan Islam .....	
<b>BAB V</b>	<b>MODEL IMPLEMENTASI DAN DAMPAK SOSIAL AKADEMIK DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MODERASI BERAGAMA DI PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM.....</b>	<b>159</b>
A.	Model Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama di Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.....	160
1.	Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Ranah Pengajaran .....	162
2.	Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Bidang Penelitian .....	181
3.	Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat	188
B.	Dampak Sosial dalam Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama di Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam .....	195
C.	Dampak Akademik Kebijakan Moderasi Beragama di Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.....	18
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>203</b>
A.	Kesimpulan.....	203
B.	Kritik dan saran .....	207
C.	Penutup.....	208
	DAFTAR PUSTAKA.....	209
	RIWAYAT HIDUP .....	234

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kajian Pustaka Politik Pendidikan Tinggi dan Moderasi Beragama .....	11
Tabel 1.2	Jadwal Agenda Pelaksanaan Penelitian.....	26
Tabel 2.1	Daftar Nama dan Lokasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).....	43
Tabel 2.2	Daftar IAIN hingga akhir 1998 (Orde Baru).....	59
Tabel 2.3	Daftar Menteri Agama Era Orde Baru .....	61
Tabel 4.1	Ringkasan Aspek Organisasi Rumah Moderasi UIN Walisongo, IAIN Surakarta, IAIN kudu.....	138
Tabel 5.1	Tabel Cakupan Capaian Mata Kuliah Islam dan Moderasi Beragama .....	172
Tabel 5.2	Tema-tema Prioritas Penelitian Kementerian Agama ARKAN (2018-2028).....	182



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Analisis Data Model Interaktif.....	31
Gambar 2.1	Pendidikan Tinggi Islam, Sejarah, Politik, Dan Dinamika Perkembangannya .....	36
Gambar 3.1	Peta Konsep Moderasi Beragama, Kebijakan Publik dan Politik Identitas .....	88
Gambar 3.2	<i>Roadmap</i> Moderasi Beragama Kementerian Agama	102
Gambar 3.3	Dimensi Tugas Negara .....	105
Gambar 3.4	Tahapan Proses Pembuatan Kebijakan.....	109
Gambar 3.5	Tiga Elemen Sistem Kebijakan .....	111
Gambar 4.1	Moderasi Beragama, Resepsi dan Negosiasi Politik di Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam .....	129
Gambar 4.2	Model-model Relasi Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Publik.....	145
Gambar 4.3	Relasi Ideal Aspek Individu dan Sosial dalam Kebijakan Moderasi Beragama .....	148
Gambar 4.4	Modul Membangun Karakter Moderat hasil dari Program kegiatan PKPPN.....	152
Gambar 5.1	Model Implmentasi Moderasi Beragama dan Dampak Sosial Akademik.....	160
Gambar 5.2	Model Implementasi Moderasi Beragama di IAIN Surakarta .....	165
Gambar 5.3	Model Pengajaran Moderasi Beragama dengan Pendekatan Keteladanan Tokoh .....	169
Gambar 5.4	Religiografi Modul Praktik Moderasi Beragama IAIN Kudus.....	179
Gambar 5.5	Model Internalisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama Melalui Penelitian .....	185
Gambar 5.6	Gerakan Prioritas Kegiatan Program Kuliah Kerja Nyata Moderasi Beragama.....	190
Gambar 5.7	Dampak Perubahan Sosial dalam Implementasi Moderasi Beragama .....	196
Gambar 5.8	Dampak Akademik Kebijakan Implementasi Moderasi Beragama .....	199



## DAFTAR LAMPIRAN

Surat Izin Penelitian.....229



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Reformasi 1998 dielu-elukan sebagai kran kebebasan dan menjadi *timing* yang tepat membuka ruang-ruang partisipatif egaliter bagi masyarakat ataupun kelompok kepentingan untuk menyerukan kepentingan dan keinginan golongannya.<sup>1</sup> Dapat dipastikan tanpa kehadiran reformasi tahun 1998 ormas-ormas garis keras yang kehadirannya meresahkan masyarakat umum tersebut tidak akan muncul dan tidak kelihatan eksistensinya dikarenakan represi politik dan ancaman dari otoritas.<sup>2</sup> Pemerintah dari masa ke masa dalam hal ini sebenarnya sudah melakukan antisipasi seperti pada masa Soeharto, Indonesia menerapkan UU anti subversi walaupun dalam pelaksanaannya disalahgunakan untuk tujuan-tujuan represif. Kebijakan ini ditetapkan dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia No 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.<sup>3</sup>

Program deradikalisasi yang selama ini kurang memberikan sumbangsih dalam meminimalisir fenomena radikalisme yang ada, muncul gaung moderasi sebagai alternatif di tengah “tumpulnya” deradikalisasi yang selama ini belum berfungsi secara maksimal.<sup>4</sup> Bahkan program deradikalisasi yang selama ini didengungkan dan diimplementasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dicurigai melahirkan bibit radikalisme dalam bentuk yang baru.<sup>5</sup> Moderasi Islam (*Islam Wasathiyah*) akhir-akhir menjadi diskursus menarik di kalangan para akademisi dan peneliti, di tengah-tengah munculnya pandangan ekstrem dari sebagian kelompok dalam

---

<sup>1</sup>Beetham David, “The Quality of Democracy: Freedom as the Foundation,” *Journal Of Democracy*, Vol 4, 2004.

<sup>2</sup>Masdar Hilmy, “The Politics of Retaliation: The Backlash of Radical Islamists against Deradicalization Project in Indonesia,” *Al-Jami’ah* 51, no. 1 (2013).

<sup>3</sup>Hans Thoolen, *Indonesia and the Rule of Law: Twenty Years of “New Order” Government: A Study* (London: Pinter Pub Ltd, 1987).

<sup>4</sup>Mohammad Hashim Kamali, *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur’anic Principel of Wasatiyyah* (USA: Oxford University Press, 2015), 48.

<sup>5</sup>Haedar Nashir, “Moderasi Indonesia Dan Keindonesiaan; Perspektif Sosiologi,” *Pidato Pengukuhan Gurubesar Di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (12 Desember 2019)*, 2019, 67–70.

memahami dan menafsirkan ajaran Islam, dampak dari pembacaan ini ialah praktek intoleran dan aksi radikalisme di kehidupan sehari-hari.<sup>6</sup>

Moderasi beragama menjadi *tagline* Kementerian Agama dalam berbagai kegiatan dan program kerja yang dirumuskan. Pentingnya moderasi beragama yang diusung Kementerian Agama mendapatkan sambutan dan dukungan positif dari Kementerian Bappenas yang terwujud dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.<sup>7</sup> Dalam pengimplementasian moderasi beragama dapat melalui 5 metode kerja *Pertama*; penguatan, pola pikir, sikap, jalan tengah; *Kedua*, harmoni dan kerukunan umat beragama; *Ketiga* penyelerasan relasi agama dan budaya; *Keempat* kualitas pelayanan kehidupan beragama dan *Kelima* pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.<sup>8</sup>

Jalur pendidikan menjadi salah satu instrumen yang paling efektif dalam memoderasi cara beragama seseorang. Intoleransi, radikalisme dan terorisme tidak bisa dibendung hanya pada usaha represif semata, melainkan usaha-usaha yang sifatnya preventif menjadi penting sebelum meledaknya kekerasan dan rasa tidak percaya semakin massif.<sup>9</sup> Lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti Pondok Pesantren, Madrasah, Perguruan Tinggi dapat memainkan peran sentral dalam upaya membendung penyebaran paham ideologi transnasional yang semakin mengglobal.<sup>10</sup> Arah pendidikan Indonesia ialah untuk mencetak anak generasi bangsa yang bersifat mistik-imanen. Disitu ia melihat bahwa agama adalah untuk menjawab tantangan realitas, bukan untuk dirinya sendiri. dengan demikian agama bukan terpisah dari realitasnya dimana ia teruntuk dirinya sendiri (mistik-transenden).<sup>11</sup>

<sup>6</sup>Pidato Pengukuhan Guru Besar Abdul Mustaqim dalam Bidang Ulumul Qur'an disampaikan di Hadapan Senat Terbuka UIN Sunan Kalijaga 16 Desember 2019, Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019), 5.

<sup>7</sup>Muhamadiyah Amin, Dirjen Bimas Islam, dalam pengantar Buku *Moderatisme Agama*, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, *Moderatisme Islam* (Jakarta, 2019), VI.

<sup>8</sup>*Moderatisme Islam*.

<sup>9</sup>Mayssoun Sukarieh and Stuart Tannock, "The Deradicalisation of Education," *Journal Terror, Youth and the Assault on Learning* 57, no. 4 (2016): 28–35.

<sup>10</sup>Toto Suharto, "Remoderasi Pendidikan Islam Di Indonesia: Tantangan Ideologis," *Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Filsafat Pendidikan Islam IAIN Surakarta*, February 20, 2020, 7.

<sup>11</sup>Imanen atau imanensi ialah paham yang menekankan berpikir dengan

Pendidikan Islam dari masa ke masa sangat dipengaruhi dan menggantungkan eksistensi pada otoritas yang menaunginya, lihat saja pendidikan Islam pada masa pra kemerdekaan dengan pasca kemerdekaan, pada masa pra kemerdekaan eksistensi pendidikan Islam seperti “katak dalam tempurung” peran dan sepak terjang pendidikan Islam diawasi ketat oleh otoritas Belanda melalui pelbagai kebijakan yang dikeluarkannya, seperti *Priesterraden*, *Ordonansi Guru*, *Ordonansi Sekolah Liar*.<sup>12</sup> Kebijakan pendidikan yang dikeluarkan Belanda yang terwujud dalam Kebijakan-kebijakan dalam hal pendidikan membelenggu eksistensi pendidikan Islam masa itu, kekhawatiran Belanda dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam dunia pendidikan ialah demi mengukuhkan otoritas yang dimilikinya.

Sedangkan pada masa orde lama pendidikan Islam di Indonesia mengalami dinamika yang fluktuatif, karena secara psikologis maupun fisik Indonesia baru saja terlepas dari penjajahan. Pada masa ini jika dilihat dari sisi positifnya pendidikan Islam mampu menjadi spirit nasionalisme kebangsaan, sedangkan dari sisi negatifnya ialah adanya diskriminasi pada tujuan dan esensi pendidikan.<sup>13</sup> Hal ini dapat difahami dengan situasi perpolitikan masa-masa awal kemerdekaan dan didukung dengan fakta-fakta historis yang ada. Walhasil pendidikan Islam masa itu terhambat dan tertantang dalam penguatan baik pendidikan Islam formal maupun pendidikan Islam yang ada di sekolah formal.<sup>14</sup> Kondisi ini membuktikan adanya hubungan yang erat antara stabilitas perpolitikan dengan kemajuan Negara dalam bidang pendidikan, dalam hal ini pendidikan Islam sangat dipengaruhi

---

diri sendiri subjektif, sedangkan mistik transenden merupakan pola berfikir yang melampaui apa yang sekedar terlihat yang dapat dilihat di alam semesta, Benny Susetyo, *Politik Pendidikan Penguasa* (Yogyakarta: LKiS, 2005), 56.

<sup>12</sup>“Priesterraden badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam, sedangkan Ordonansi Guru dan Ordonansi Sekolah Liar adalah kebijakan yang memberantas izin Guru dan Madrasah dalam pendidikan yang tidak sesuai dengan visi-misi Belanda. Peraturan ini dikeluarkan setelah munculnya gerakan nasionalisme-Islamisme pada tahun 1928 M, yaitu berupa Sumpah Pemuda. Abdurrachman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam Dari Pra-Proklamasi Ke Reformasi* (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005), 113.

<sup>13</sup>Zamakhshari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenal Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2011), 169.

<sup>14</sup>Darul Abror, “Politik Penguatan Institusi Pendidikan Tinggi Islam Indonesia,” *Conciencia* 18, no. 2 (December 30, 2018): 28–29.

dengan otoritas yang berkuasa dalam meramu dan merumuskan kebijakan pendidikan dalam bingkai politik pendidikan nasional.

Dalam perjalanan waktu pendidikan Islam di Indonesia menyongsong kehadiran era reformasi yang diwarnai dengan pergantian penguasa politik di Indonesia pada tahun 1998 tepatnya masa-masa awal tumbanganya Orde Baru, secara tidak langsung menimbulkan ketegangan sosial di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Keadaan ini memunculkan traumatis yang mendalam serta lahirnya semacam fobia terhadap segala hal yang mempunyai kaitan dengannya, keadaan ini memberi pengaruh yang luar biasa terhadap dunia pendidikan.<sup>15</sup> Kondisi sosial, lingkungan, politik, kultural dan geografis tersebut telah mewarnai dan memberikan karakteristik terhadap politik pendidikan tinggi Indonesia sesuai dengan semangat perubahan zaman dan romantika revolusi, dinamika pembangunan dan gerakan reformasi yang selama ini berlangsung secara dramatis.<sup>16</sup> Sejalan dengan ini, hubungan kepemimpinan yang demokratis dengan politik pendidikan, institusi pendidikan, masyarakat melek politik berhubungan erat kaitannya akan ketercapaian tujuan pendidikan yang selaras dengan tujuan Negara pada umumnya.<sup>17</sup>

Politik pendidikan yang dimaksud tergambarkan secara jelas dalam produk kebijakan-kebijakan strategis pemerintah melalui otoritas Kemendikbud maupun Kemenag.<sup>18</sup> Politik pendidikan tinggi sebagai bagian dari politik pendidikan telah dikenal sejak manusia berpolitik, sejalan dengan keputusan pemerintah untuk mendirikan dan mengembangkan pendidikan tinggi bagi warganya.<sup>19</sup> Keberadaan pendidikan tinggi secara kelembagaan memang terjadi beberapa kali perubahan otoritas yang menaunginya, yaitu pada tahun 2014 pendidikan tinggi sempat menjadi entitas sendiri dalam wadah

---

<sup>15</sup>Ismail Makki, "Dinamika Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi," *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (December 31, 2016): 159–171.

<sup>16</sup>Anwar Arifin, *Politik Pendidikan Tinggi Indonesia* (Jakarta: Pustaka Indonesia, 2013), 3.

<sup>17</sup>David N Plank and William Lowe Boyd, *Antipolitics, Education, and Institutional Choice: The Flight From Democracy* (USA: Sage Publication, 1994), 63.

<sup>18</sup>Ahmad Zain Sarnoto, "Konsepsi Politik Pendidikan Di Indonesia," *Educhild: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya* 1, no. 1 (2012): 32.

<sup>19</sup>Politik pendidikan tinggi dalam tataran operasioanal telah berlangsung di semua Negara dalam berbagai ideologi sesuai dengan sistem politik dan ideologi yang digunakan masing-masing Negara, Arifin, *Politik Pendidikan Tinggi Indonesia*, 1.

Kemenristekdikti (Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi) dan memisahkan diri dari keruwetan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah secara nasional, akan tetapi nomenklatur Kemenristekdikti inipun bertahan hanya dalam kurun lima tahun dan kembali menginduk pada Kemendikbud di era kepemimpinan Joko Widodo periode kedua.<sup>20</sup>

Dalam setiap sistem pendidikan tinggi, pemerintah memainkan peran tertentu dalam membentuk dan mengkoordinasikan sistem. Keterlibatan aktual pemerintah dalam pendidikan tinggi, bagaimanapun sangat bervariasi, bisa dalam bentuk kebijakan yang *soft* sampai dengan kebijakan yang ekstrim dalam mempertahankan otoritas yang dimilikinya.<sup>21</sup> Dinamika sosial, politik di Indonesia sangat mempengaruhi eksistensi perkembangan pendidikan di Indonesia.<sup>22</sup> Politik dan pendidikan menjadi entitas yang saling memberikan peluang dan mempengaruhi satu dengan yang lainnya.<sup>23</sup> Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga pendidikan (Pendidikan Tinggi) dapat berfungsi sebagai alat kekuasaan dalam upaya membentuk sikap dan pandangan politik sesuai dengan harapan penguasa.<sup>24</sup>

Keberadaan Perguruan Tinggi Indonesia secara kuantitatif baik yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan kebudayaan maupun Kementerian Agama dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahunan 2008-2014 menunjukkan bahwa perguruan tinggi mengalami pertumbuhan 3,41 persen pertahun.<sup>25</sup> Secara nyata perkembangan PTKI mengalami perkembangan yang cukup signifikan terdapat 58 PTKIN yang tersebar di seluruh penjuru negeri dan terdapat

---

<sup>20</sup>Kemenristekdikti (Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi) merupakan Kementerian yang lahir di Era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo 2014-2019 yang merupakan penggabungan antara Kementerian Riset dan Teknologi dengan Pendidikan Tinggi yang sebelumnya di bawah otoritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan dalam periode ke-dua nomenklatur Pendidikan Tinggi (Dikti) kembali lagi menjadi wewenang Kemendikbud yang dipimpin oleh Nadiem Makarim.

<sup>21</sup>G Neave and F.A Vught, *Prometheus Bound: The Changing Relationship between Government and Higher Education in Western Europe*, (Oxford: Pergamon Press, 1991).

<sup>22</sup>Lee Kamhing, *Education and Politics in Indonesia 1945-1965* (Kuala Lumpur: Universitas of Malaya Press, n.d.).

<sup>23</sup>M Sirozi, *Politik Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 36–37.

<sup>24</sup>Ach Syaiful, "Politik Pendidikan Islam Masa Reformasi," *Al Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan* 2, no. 1 (March 21, 2018): 139.

<sup>25</sup>Mayling Oey Gardiner, *Era Disrupsi Peluang Dan Tantangan Pendidikan Tinggi Indonesia* (Jakarta: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2017), 3.



818 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta. Pertumbuhan ini lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan perguruan tinggi milik Negara (PTN) yang angkanya hanya berkisar 2,1 persen, sangat jauh jika dibandingkan dengan perkembangan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang angka pertumbuhannya sampai 3,46 persen. Pertumbuhan paling pesat ditunjukkan oleh perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Agama (3,61 persen). Survey ini cukup menggembirakan bagi Kementerian Agama karena dari survey ini setidaknya ekspansi perguruan tinggi keagamaan mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan PTN. Pertumbuhan perguruan tinggi Islam di sini menjadi entitas yang cukup berpengaruh terhadap stabilitas keadaan sosial, ekonomi, agama dan budaya yang ada di Indonesia, terlebih dalam bidang pendidikan agama menjadi salah satu corong pemerintah dalam menyebarkan virus kedamaian di tengah-tengah masyarakat.

Dalam kenyataannya kondisi real perguruan tinggi yang multikultural, ekspresi keberagaman oleh individu atau kelompok dalam menunjukkan identitas diri serta eksistensinya mendorong terjadinya tindakan-tindakan berlebihan, fanatisme, yang justru mengancam keberagaman serta memberikan stimulus dan legitimasi bagi lahirnya sikap ekstrem dan radikal dalam berpikir serta bertindak.<sup>26</sup> Dalam dua dekade ini Indonesia seperti juga banyak negara lain, berjibaku dengan ancaman terorisme, radikalisme dan ekstremisme kekerasan yang dewasa ini kian kompleks.<sup>27</sup> Kompleksitas ancaman keberagaman dan kebangsaan yang mengancam dewasa ini secara tidak langsung memanfaatkan momentum perkembangan teknologi yang semakin masif, dan didukung dengan arus demokrasi yang memberikan peluang untuk semua orang untuk berekspresi, namun momentum ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab untuk mewujudkan keinginannya yang tidak sesuai dengan norma kepatutan baik agama, sosial dan Negara secara anarkis.

Berkaca dari hasil survei nasional yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri (PPIM-UIN) Jakarta pada tahun 2017 dan 2018, masing-masing menemukan

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, 173.

<sup>27</sup>Yayah Khisbiyah, dkk, *Kontestasi Wacana Keislaman Di Dunia Maya Moderatisme, Ekstremisme, Dan Hipernasionalisme* (Surakarta: Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), 2.

bahwa lebih dari separuh siswa SMA dan mahasiswa di Indonesia, serta para guru di semua tingkatan, memiliki pandangan dan sikap intoleran terhadap agama selain dirinya.<sup>28</sup> Fakta historis intoleransi yang menyeruak di tengah-tengah pelajar dan pengajar agama Islam yang tersebar di berbagai sekolah, hal ini memberi sinyal bahwa ada persoalan yang mendasar dalam proses pembelajaran dan proses produksi guru di lingkungan perguruan tinggi. Kondisi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan, seperti: dari mana sumber pandangan intoleransi para siswa dan guru agama tersebut berasal, atau sejauh mana imunitas guru PAI dalam menghadapi arus Islamisme.<sup>29</sup>

Tren intoleransi dan radikalisme di Indonesia dalam beberapa survey mengalami kenaikan yang cukup signifikan, realitas ini memang tidak bisa dipandang sepele hal ini akan menjadi bom waktu yang akan mengancam stabilitas bangsa. Lihat saja survey yang dilakukan Wahid Institute pada tahun 2020 dalam surveynya merilis ada sekitar 0,4 atau sekitar 600.000 jiwa penduduk Indonesia pernah melakukan tindakan radikal, yang lebih mencengangkan ialah potensi masyarakat untuk melakukan tindakan radikal atas nama agama mencapai 11,4 juta, sedangkan sikap intoleran yang dulu hanya pada kisaran angka 46% dan saat ini mencapai angka 54%.<sup>30</sup> Hasil senada juga sebagaimana yang dilakukan Lembaga Survey Indonesia (LSI) dalam surveynya mengungkapkan bahwa masih ada sekitar 53% masyarakat yang keberatan akan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan umat agama lain di lingkungan tempat tinggalnya.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup>Riset PPIM UIN Jakarta, Guru di Indonesia mulai dari tingkat TK/RA hingga SMA/MA memiliki opini intoleran dan radikal yang tinggi. “Secara umum, persentasenya sudah di atas 50% guru yang memiliki opini yang intoleran. Sebanyak 46.09% memiliki opini radikal. Sedangkan jika dilihat dari sisi intensi-aksi, walaupun lebih kecil nilainya dari pada opini, namun tetap hasilnya mengkhawatirkan. Sebanyak 37.77% guru intoleran dan 41.26% yang radikal. Yosephine Dian Indraswari, *To Facilitate Dialogue, To Nurture Diversity* (Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, 2019).

<sup>29</sup>Muhammad Wildan, dkk, *Menanam Benih Di Ladang Tandus Potret Sistem Produksi Guru Agama Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: CISForm Center for the Study of Islam and Social Transformation Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2019), v.

<sup>30</sup>The Wahid Institute, merupakan lembaga yang konsen terhadap isu-isu tentang toleransi, toleransi, multikulturalisme dan demokrasi, yang mempunyai tujuan untuk mendorong terciptanya kedamaian dan kesejahteraan bersama

<sup>31</sup>Lembaga Survey Indonesia (LSI), merilis temuan survey terkait modal dan tantangan kebebasan sipil, intoleransi dan demokrasi di pemerintahan Jokowi periode ke dua. Hasil survey yang sama Survey Sayful Mujani Research



Maka dari itu pengelolaan Perguruan Tinggi harus mampu menjawab tuntutan dan tantangan perubahan lingkungan yang sangat dinamis.<sup>32</sup>

Realitas faktual yang mencerminkan intoleransi, diskriminasi, radikalisme di Indonesia akhir-akhir ini menjadi tanggung jawab bersama masyarakat maupun pemerintah. Kementerian Agama ikut andil “urun rembuk” dalam upaya meminimalisir gejala-gejala yang memecah dan mengancam kebhinekaan bangsa Indonesia, dengan menawarkan konsep moderasi beragama sebagai jalan alternatif di tengah-tengah menguatnya paham konservatif dan berkembangnya paham liberal. Kemenag menjadikan moderasi beragama sebagai landasan berfikir, bersikap dan sebagai pijakan dalam merumuskan kebijakan dan program yang ada di Kementerian Agama.

Pendidikan tinggi keagamaan menjadi wahana yang paling relevan dalam menyemai virus moderasi beragama. Lembaga pendidikan tinggi dapat menjadi embrio gagasan kebangsaan, nilai nasionalisme, penegakan demokrasi, dan dapat menjadi tempat untuk menggembleng generasi muda agar hidup dan bersosial secara damai di tengah perbedaan yang ada.<sup>33</sup> Pendidikan tinggi keagamaan Islam sebagai pusat studi Islam kontemporer dewasa ini sedang dihadapkan dengan berbagai tantangan baru, yang saat ini sedang berhadapan dengan dinamika perubahan sosial yang sangat dinamis, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan revolusi bidang telekomunikasi yang sangat pesat.<sup>34</sup> Tantangan perguruan tinggi keagamaan makin kompleks, salah satu ancaman yang cukup mengkhawatirkan ialah menyusupnya paham keagamaan yang eksklusif di tengah-tengah lingkungan pendidikan tinggi keagamaan.<sup>35</sup> Fakta sosial yang berkembang di perguruan tinggi Islam ini harus disikapi dengan arif

---

and Consulting (SMRC) yang dilakukan akhir Februari hingga awal Maret bahwa terdapat 11% warga Indonesia merasa takut dan tidak nyaman dalam menjalankan ibadah dan keyakinannya yang dibayangi akan tindakan anarkis dari golongan yang lain.

<sup>32</sup>Iskandar Agung and Agus Santoso, “Dinamika LPTK Menuju Perguruan Tinggi Kelas Dunia (World Class University/WCU),” *Perspektif Ilmu Pendidikan* 31, no. 1 (April 2017): 42–54.

<sup>33</sup>Babun Suharto, *Moderasi Beragama Dari Indonesia untuk Dunia* (Yogyakarta: LKiS, 2019), 6.

<sup>34</sup>Hasbiyallah Hasbiyallah et al., “Memotret Wajah Islam Melalui Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Di Indonesia,” *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 17, no. 2 (December 27, 2019): 237, <https://doi.org/10.18592/khazanah.v17i2.3216>.

<sup>35</sup>Suharto, *Moderasi Beragama Dari Indonesia Untuk Dunia*, xi.

oleh semua pihak agar tidak menimbulkan kegelisahan dan ancaman terbaru dalam stabilitas sosial dimasa yang akan datang.

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Kementerian Agama, melalui Dirjen Pendidikan Islam ikut andil dalam mempromosikan moderasi beragama dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor B-3663.1/Dj.I/BA.02/10/2019 tertanggal 29 Oktober 2019 tentang Edaran Rumah Moderasi Beragama. Dalam surat edaran ini Dirjen Pendis menginstruksikan perihal pentingnya moderasi beragama di dunia kampus dengan memerintahkan mendirikan rumah moderasi di masing-masing PTKIN. Lalu yang menjadi pertanyaan besar yang menggelayuti akademisi PTKIN ialah bagaimana merealisasikan konsep moderasi beragama di dunia kampus?. Bisakah dunia kampus menerjemahkan moderasi beragama ke dalam aspek yang lebih aplikatif?. Seberapa urgenkah moderasi beragama di kampus keagamaan Negeri?.

Berangkat dari sinilah riset tentang kebijakan moderasi beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dirasa sangat perlu dan penting untuk dikaji dan diteliti baik dari aspek kebijakan, sosial keagamaan, model implementasi dan dampak yang dihasilkan dari kebijakan ini. Maka peneliti mengambil tema besar dalam penelitian ini yaitu tentang “Politik Kebijakan Moderasi Beragama” Resepsi, Negosiasi dan Model Implementasi di PTKIN.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian fakta lapangan yang dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, muncul beberapa persoalan yang dapat diidentifikasi dari berbagai perspektif, di antaranya;

1. Politik pendidikan tinggi masih menyisakan persoalan baik dalam tataran kebijakan maupun teknis.
2. Pasca reformasi banyak bernunculan faham-faham intoleransi yang menggerogoti keberagamaan dan keragaman bangsa.
3. Masih banyaknya persoalan intoleransi, radikalisme di tengah-tengah masyarakat pasca Orde Baru.
4. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri masih gamang dalam merealisasikan moderasi beragama
5. Moderasi beragama menjadi salah satu solusi dari persoalan radikalisasi, intoleransi, namun masih menyisakan persoalan dalam tahapan implementasi.

6. Munculnya tumpang tindih kepentingan dalam kebijakan moderasi Islam di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.
7. Rumah moderasi masih sebatas himbauan dan pendirian, belum pada taraf implementasi real .
8. Munculnya ambiguitas dalam menafsirkan kebijakan menjadi penghambat dalam merealisasikan kebijakan.
9. Munculnya kebijakan moderasi beragama “dicurigai” sebagai bagian dari upaya penguasa untuk menyatukan persepsi keagamaan yang seirama dan mendukung akan program dan tujuan penguasa.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari identifikasi masalah yang ada, dapat dirumuskan masalah penelitian yang hendak diteliti, yaitu Bagaimana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam menerjemahkan kebijakan moderasi beragama di lingkungannya? Berangkat dari rumusan masalah ini dapat dipetakan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana resepsi pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) terhadap kebijakan moderasi beragama?
2. Bagaimana interpretasi pimpinan PTKIN terhadap kebijakan moderasi beragama dan internalisasi nilai-nilai moderasi beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri?
3. Bagaimana efektifitas penerapan kebijakan moderasi beragama di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri?

### **D. Tujuan dan Manfaat**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah ada, penelitian ini mempunyai tujuan di antaranya;

1. Untuk mengungkap dan menemukan pola resepsi pimpinan perguruan tinggi keagamaan Islam dalam kebijakan moderasi beragama terkhusus dalam lingkup perguruan tinggi yang dimilikinya.
2. Untuk menemukan model internalisasi nilai-nilai moderasi beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
3. Untuk mengetahui efektifitas kebijakan moderasi beragama di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.

Sedangkan manfaat penelitian ini, dapat dilihat dari tujuan penelitian yang ada, bahwa manfaat penelitian ini diharapkan dapat

menyumbang manfaat secara teoritis maupun manfaat penelitian secara praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu munculnya kajian akademik mengenai Politik Pendidikan Tinggi Islam dan kaitannya dengan pengarusutamaan moderasi Islam di lingkup perguruan tinggi. Secara praktis penelitian ini setidaknya memberikan *role model* bagi lembaga pendidikan dalam mengimplementasikan moderasi Islam dalam kegiatan akademiknya.

### E. Kajian Pustaka

Kajian serta penelitian mengenai Politik Pendidikan Tinggi maupun tentang Moderasi Islam memang bukan kali pertama ini. Penelitian mengenai tema ini memang sudah banyak penelitian yang dilakukan oleh para peneliti pendahulu baik dalam maupun luar negeri. Namun penelitian yang sudah ada masih ada “celah” yang mengusik bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini dengan harapan “celah-celah” itu dapat tertutup dengan riset ini. Selain itu, telaah pustaka dilakukan dalam rangka untuk membedakan “*differentiation*” sekaligus memposisikan “*Positioning*” dalam penelitian yang akan dilakukan. Kajian pustaka dalam penelitian ini difokuskan pada dua variabel yang mengitari rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu pertama; politik pendidikan tinggi Indonesia dan kedua moderasi beragama, detail pembahasan mengenai kajian pustaka dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Kajian Pustaka Politik Pendidikan Tinggi dan Moderasi Beragama**

NO	Politik Pendidikan Tinggi, Urgenitas dan Dinamika Pengembangannya	Moderasi Beragama, Prinsip, teori dan Implementasi.
1.	<i>Politik Pendidikan Bahasa Arab di Perguruan Tinggi Analisis Wacana atas Program Studi Bahasa Arab UIN Jakarta dan UI, (Mauidlotun Nisa)</i>	<i>Transnational Islamism And Political Moderation: A Comparative Analysis Of Egypt And Morocco (Yasmin Salem)</i>
2.	<i>Malaysian Higher Education and the United States as a Model: Policy Borrowing or Policy Learning? (Arnida Abdullah)</i>	<i>Moderation in the Kingdom of Saudi Arabia: An Analysis of 'Pragmatist' and 'Puritanical' Discourses (Eid AL Yahya)</i>

3.	<i>Access to Higher Education in Colombia An Assessment of Public Policy and Outcomes</i> (Lina Uribe Correa)	<i>The Controversial Moderate: Tariq Ramadan's Vision for Muslim Political Participation in Europe</i> (Rachel Anne McCarthy)
4.	Higher Education in Ireland, 1922–2016 Politics, Policy and Power—A History of Higher Education in the Irish State (John Walsh)	<i>The Wasatiyyah (Moderation) Concept in Islamic Epistemology: A Case Study of Its Implementation in Malaysia</i> (Mohd Shukri Hanapi)
5.	<i>Politik Pendidikan Islam Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Orde Baru</i> (Choirul Mahfud)	<i>Internalization of Moderate Islamic Values in Education</i> (Rahmat Kamal)
6.	<i>Pergeseran Kebijakan Pendidikan Nasional Bidang Agama Islam 1942-1994</i> (Abdurrahman Assegaf)	<i>Moderate Islam As A Solution to Pluralism In The Islamic World: The Experience of Indonesia</i> (Musawar)

### 1. Kajian Pustaka terkait Politik Pendidikan Tinggi, Urgentitas dan Dinamika Pengembangannya.

*Pertama*; Disertasi yang ditulis Maudlotun Nisa, mahasiswi Program Doktor Pengkajian Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta meneliti dengan judul *Politik Pendidikan Bahasa Arab di Perguruan Tinggi Analisis Wacana atas Program Studi Bahasa Arab UIN Jakarta dan UI*.<sup>36</sup> Riset ini menyimpulkan bahwa realitas pendidikan bahasa Arab di Perguruan Tinggi di Indonesia merupakan perwujudan dari refleksi politik makro dan politik mikro. Riset ini membandingkan bagaimana realitas pengajaran bahasa Arab yang ada di UIN Jakarta dengan Universitas Indonesia (UI), prodi bahasa Arab di UIN Jakarta dengan UI memiliki politik mikro dalam menerjemahkan politik makro pendidikan. Disertasi ini menyimpulkan bahwasannya wacana yang muncul dari praktik pendidikan bahasa Arab di UIN Jakarta dan UI adalah adanya tumpang tindih fokus kajian, orientasi sekuler, tujuan, keindonesian, kapitalisme, volunterisme, integrasi dan *political will* yang rendah.

<sup>36</sup>Maudlotun Nisa, "Politik pendidikan bahasa arab di perguruan tinggi : Analisis wacana atas Program Studi Bahasa Arab di UIN Jakarta dan UI," May 2018, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspa,ce/handle/123456789/>.



*Kedua*; Disertasi yang ditulis Arnida Abdullah, yang berjudul *Malaysian Higher Education and the United States as a Model: Policy Borrowing or Policy Learning?*,<sup>37</sup> Arnida Abdullah berangkat dari pandangan bahwa pendidikan tinggi memainkan peran penting di banyak negara berkembang. Penelitian ini dilakukan di Malaysia yang merupakan Negara berkembang. Karakter Negara berkembang cenderung mengadopsi model organisasi pendidikan tinggi dari negara maju, terutama yang merupakan pemimpin dunia. Maka pada bagian pertama dari disertasi ini, mengungkap kebijakan yang dilakukan Amerika Serikat yaitu terkait perluasan akses pendidikan tinggi, hambatan untuk berpartisipasi dalam pendidikan tinggi, angka putus sekolah diperiksa secara lebih rinci. Ini kemudian mengarah pada diskusi utama tentang jenis-jenis lembaga pendidikan tinggi di AS, pola pendaftaran mereka dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing lembaga. Pada bagian kedua, penelitian ini difokuskan atas kebijakan yang ada di Malaysia. Dimulai dengan tinjauan sejarah sebelum kemerdekaan, dengan fokus pada perkembangan ekonomi, sosial dan pendidikan. Pertumbuhan dan transformasi struktural ekonomi Malaysia juga diperiksa dan dibandingkan dengan pencapaian pendidikan. Tren dalam ekspansi pendidikan publik primer dan sekunder dan tantangan yang dihadapi sistem publik ini kemudian dibahas, yang mengarah ke diskusi rinci tentang pengembangan sektor pendidikan tersier publik dan swasta yang ada di Malaysia.

Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada pembelajaran kebijakan dalam pendidikan tinggi di negara berkembang. Fokus riset ini pada upaya Malaysia untuk belajar dari pengalaman AS. Temuan studi ini dapat membantu pembuat kebijakan Malaysia dalam merancang kebijakan baru yang ditingkatkan untuk memperluas akses di pendidikan tinggi dan untuk lebih memperkuat sektor pendidikan tinggi Malaysia.

*Ketiga*; Disertasi yang ditulis Lina Uribe Correa dengan judul *Access to Higher Education in Colombia An Assessment of Public Policy and Outcomes*.<sup>38</sup> Disertasi ini fokus menganalisis

---

<sup>37</sup>Arnida Abdullah, "Malaysian Higher Education and the United States as a Model: Policy Borrowing or Policy Learning?," 2013.

<sup>38</sup>Lina Uribe Correa, "Access to Higher Education in Colombia| An Assessment

serangkaian inisiatif kebijakan pendidikan nasional Kolombia, antara kurun waktu 2002-2010, yang secara teratur disebut sebagai “Revolusi Pendidikan” Kolombia. kebijakan ini merupakan upaya Kolombia untuk meningkatkan akses ke pendidikan tinggi, upaya dalam kemitraan dengan Bank Dunia. Disertasi ini menyajikan temuan tentang tujuan kebijakan, upaya, dampak, dan hasil. Konsep kebijakan akses yang digunakan di sini adalah konsep luas yang menempatkan lembaga sosial dan politik (termasuk pemerintah) dalam peran menyamakan peluang. Konsep ini tidak hanya terdiri dari tahap masuk tetapi kondisi sebelum dan sesudah masuk ke pendidikan tinggi. Penelitian ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, berdasarkan kerangka kerja yang rumit dari kategori dan indikator kebijakan akses.

Fokus riset ini pada dua masalah: *pertama*, apakah tujuan kebijakan publik. kedua apakah perubahan kebijakan pendidikan tinggi secara signifikan mengurangi ketidaksetaraan sosial dalam akses dan kegigihan siswa, seperti yang dibayangkan oleh pembuat kebijakan nasional dan mitra Bank Dunia. Disertasi ini mengungkap beberapa dampak dan hasil kebijakan yang dapat mengubah tren historis yang terjadi di Kolombia, Kebijakan yang berpihak telah membawa peningkatan pendaftaran yang cukup besar untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Juga angka pendaftaran bersih telah meningkat dari waktu ke waktu di antara semua kelompok pendapatan.

Keempat; Riset yang dilakukan John Walsh, terkait dengan politik pendidikan tinggi di Irlandia dengan judul Higher Education in Ireland, 1922–2016 Politics, Policy and Power—A History of Higher Education in the Irish State.<sup>39</sup> Studi ini mengeksplorasi kemunculannya dari sistem pendidikan tinggi modern di negara Irlandia, tracing asalnya dari ruang tersier yang terfragmentasi termasuk universitas tradisional, pelatihan guru sekolah tinggi dan sekolah teknik pada awal abad kedua puluh secara kompleks, massif dan beragam. Penelitian ini menyimpulkan bahwasannya adanya “Segitiga Koordinasi” dalam penyelenggaraan pendidikan

---

of Public Policy and Outcomes” (State University of New York at Albany, 2013).

<sup>39</sup>John Walsh, *Higher Education in Ireland, 1922–2016: Politics, Policy and Power—A History of Higher Education in the Irish State*, 1st ed. (Palgrave Macmillan UK, 2018).

tinggi, yaitu otoritas penguasa, oligarki akademik, dan kekuatan pasar. Selain itu nasionalisme budaya dan politik juga membingkai konteks di mana lembaga pendidikan tinggi berfungsi pada awal hingga pertengahan abad kedua puluh. Perkembangan teknologi yang massif juga memberikan pengaruh yang mendalam sistem pendidikan tinggi di negara maju, berkontribusi pada penilaian ulang kebijakan, kerangka kerja kurikulum dan struktur kelembagaan di Irlandia.

Kelima; Disertasi yang ditulis Choirul Mahfud yang berjudul *Politik Pendidikan Islam Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Orde Baru*.<sup>40</sup> Kajian disertasi ini merupakan hasil penelitian disertasi program Doktorat di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya tahun 2014. Karya ini mencoba menganalisa tentang produk kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan pendidikan Islam di Indonesia pasca tumbanganya Orde Baru atau lazimnya disebut era reformasi sampai pada akhir tahun 2013. Dalam konteks ini tumbanganya rezim Orde Baru ditandai dengan reformasi politik pada tahun 1998 memiliki dampak besar dalam seluruh aspek kehidupan bangsa, termasuk di dalamnya arah baru pendidikan Islam di Indonesia. Oleh karena itu, persoalan inilah yang menarik perhatian Choirul Mahfud untuk meneliti kait dan kelindannya antara politik dan pendidikan Islam di Indonesia yang selama ini dianggap sebagai entitas yang berbeda dan tidak mungkin dikaji dalam satu perspektif.

Pandangan Choirul Mahfud, perkembangan pembangunan sejalan dengan ideologi, motivasi dan kepentingan pada zamannya. Semisal kepemimpinan Soekarno, "*Politic is The King*" dan ia sering *me-reshuffle* kabinetnya, selain itu dia juga ideologi politik lebih menonjol. Sedangkan di era Soeharto menganggap "*economics is the king*" sehingga pada zaman Soeharto pembangunan fisik menjadi prioritas utama. Sementara dalam kepemimpinan Susilo Bambang Yudoyono ialah yang tampak "*democracy is the king*" yang ditandai dengan kebebasan berdemokrasi, namun demokrasi dalam hal ini belum dalam taraf demokrasi substansial namun baru dalam taraf demokrasi prosedural dan terkesan hanya banyak

---

<sup>40</sup>Disertasi ini telah diterbitkan menjadi buku ; lihat Choirul Mahfud, *Politik Pendidikan Islam Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pasca Orde Baru* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).



mengeluarkan *cost* dari pada *benefits*. Dari beberapa motivasi rezim pemerintahan tersebut, belum tampak sama sekali pendidikan (*education*) belum muncul menjadi prioritas utama dalam pembangunan bangsa, akibatnya dari pergantian rezim satu ke rezim yang lain masih dijumpai dengan mutu SDM dari pelbagai level.

Pada kesimpulannya Choirul Mahfud menegaskan kebijakan politik pendidikan dalam hal ini (kebijakan pendidikan Islam) sering mengalah bahkan kadang juga dikalahkan dengan kebijakan dalam sektor yang lain. Terang dan redupnya kebijakan politik pendidikan masa reformasi inilah yang menjadi perhatian utama dalam riset Choirul Mahfud, dengan menganalisa bagaimana realitas yang terjadi baik pemegang otoritas (pemerintah) maupun pelaku pendidikan, melalui produk kebijakan dan implementasi kebijakan pada masa reformasi.<sup>41</sup>

*Keenam*; Disertasi yang ditulis Abd. Rachman Assegaf yang berjudul *Pergeseran Kebijakan Pendidikan Nasional Bidang Agama Islam 1942-1994*.<sup>42</sup> Penelitian ini menguak bagaimana kebijakan pendidikan nasional dalam bidang Islam dari tahun 1942-1994. Penelitian ini memberi gambaran bagaimana arah kebijakan masa kolonial sampai pada masa Orde Baru. Dalam penelitian ini menggunakan keterpaduan antara penelitian sejarah (*historical research*) dengan analisis kebijakan (*policy analysis*). Disertasi ini mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan pendidikan agama antara tahun 1942 hingga tahun 1994, kajian penelitian ini dispesifikasikan menjadi tiga periode. Pertama periode masa perjuangan hingga Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1945, kedua periode awal kemerdekaan yaitu (1945-1965), ketiga masa pembangunan era Orde Baru hingga tahun 1994 dimana ditandai dengan pemberlakuan kurikulum 1994.

*Ketujuh*; Riset-riset terkait politik pendidikan yang *terpublish* di pelbagai jurnal juga menjadi acuan peneliti sebagai peta dalam menempatkan penelitian ini di tengah luasnya kajian terkait politik pendidikan di antaranya. Penelitian yang dilakukan

---

<sup>41</sup>Choirul Mahfud, *Politik Pendidikan Islam Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pasca Orde Baru* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

<sup>42</sup>Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam Dari Pra-Proklamasi Ke Reformasi*.

Darul Abror,<sup>43</sup> Ach Syaiful,<sup>44</sup> Mohammad Thoha,<sup>45</sup> Mustaqim Pabbajah,<sup>46</sup> Ahmad Baedowi,<sup>47</sup> Mohammad Asrori,<sup>48</sup> Sumarto,<sup>49</sup> Andi Wahyono.<sup>50</sup>

## 2. Kajian Pustaka terkait Moderasi Islam, Prinsip, Teori dan Implementasinya.

*Pertama*, Karya disertasi yang ditulis oleh Yasmin Salem membahas bagaimana transnasionalisme dapat memengaruhi moderasi kaum Islamis di Mesir dan Maroko, dengan judul, “*Transnational Islamism And Political Moderation: A Comparative Analysis Of Egypt And Morocco*,”<sup>51</sup> dalam disertasi ini, Yasmin melakukan analisis studi kasus komparatif mendalam untuk menilai prospek moderasi dua entitas politik Islamis, Ikhwanul Muslimin sebagai gerakan sosial transnasional dan Partai Keadilan dan Pembangunan Maroko (PJD). Baik Ikhwanul Muslimin dan PJD berkuasa setelah pemberontakan Arab pada 2011 dan merupakan pemain kunci dalam transisi demokrasi di kedua negara; Namun, entitas tidak terkait. Lebih lanjut, disertasi ini mengeksplorasi tingkat moderat Ikhwanul Muslimin dan PJD. Temuan disertasi ini menyimpulkan literatur terkini tentang Islamis dan teori moderasi berfokus pada inklusi politik, pembelajaran politik, dan represi

<sup>43</sup>Abror, “Politik Penguatan Institusi Pendidikan Tinggi Islam Indonesia.”

<sup>44</sup>Syaiful, “Politik Pendidikan Islam Masa Reformasi.”

<sup>45</sup>Mohammad Thoha, “POLITIK PENDIDIKAN ISLAM (Potret Sejarah Periode Klasik Sampai Abad Pertengahan),” *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (January 2, 2014): 20–37, <https://doi.org/10.19105/jpi.v8i1.381>.

<sup>46</sup>Hasse J and Mustaqim Pabbajah, “Politik Pendidikan Indonesia,” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 10, no. 1 (September 30, 2018): 49–60, <https://doi.org/10.30739/darussalam.v10i1.267>.

<sup>47</sup>Ahmad Baedowi, “Politik Pendidikan Atau Pendidikan Tak Berpolitik?,” *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 3, no. 4 (April 22, 2017), <https://doi.org/10.32729/edukasi.v3i4.228>.

<sup>48</sup>Mohammad Asrori, “Politik dan Pendidikan (Tinjauan Historis Pengaruh Kebijakan Politik Terhadap Sistem Pendidikan di Indonesia),” *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (December 30, 2015), <https://doi.org/10.18860/jpai.v2i1.3762>.

<sup>49</sup>Sumarto, “Perkembangan Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia,” *THAQAFIYYAT: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam* 18, no. 1 (2017): 107–27.

<sup>50</sup>Andi Wahyono, “Kebijakan Pendidikan Islam: Hibridasi Lembaga Pendidikan Tinggi,” *Jurnal Pendidikan Islam* III, no. 1 (2014): 115–34.

<sup>51</sup>Yasmin Salem, “*Transnational Islamism And Political Moderation: A Comparative Analysis Of Egypt And Morocco*” (*Dissertation*, Florida, Florida Atlantic University, 2015).

sebagai faktor yang akan memengaruhi moderasi kelompok Islamis. Memandang Islam sebagai gerakan sosial transnasional adalah aspek baru dalam studi Islamisme.<sup>52</sup>

Kajian pustaka kedua ialah disertasi yang ditulis Eid AL Yahya, dengan judul “*Moderation in the Kingdom of Saudi Arabia: An Analysis of ‘Pragmatist’ and ‘Puritanical’ Discourses.*” Disertasi ini menyelidiki tentang kebangkitan moderasi di Kerajaan Arab Saudi. Investigasi terdiri dari analisis dua tren pemikiran yang merumuskan kembali ide-ide dan proyek-proyek generasi pembangkangan sebelumnya.<sup>53</sup> Tren-tren ini, yang telah mengadopsi wacana yang jelas lebih akomodatif terhadap perbedaan pendapat, hidup berdampingan secara damai, persaingan politik, kesetaraan, pluralisme, dan inklusi gender, telah menyesuaikan diri mereka dengan konteks baru revolusi sosial. Revolusi sosial ini merupakan hasil dari perluasan hubungan dengan dunia luar, dan ini telah diperdalam melalui proses ‘reintelektualisasi’. Istilah ini digunakan oleh para sarjana politik Muslim seperti Dale Eickelman yang digunakan dalam disertasi untuk mengontekstualisasikan munculnya wacana moderasi. Secara khusus, reintelektualisasi ini berkaitan dengan dua proses, yang secara bertahap mengubah budaya ke arah debat publik yang lebih luas, partisipasi dan penerimaan nilai-nilai dialog dan keragaman secara umum. Yang pertama adalah revolusi media yang meningkatkan aliran informasi dan yang lainnya adalah massifikasi pendidikan universitas di luar negeri.

Al Yahya dalam disertasi ini berpendapat bahwa ada dua faktor gabungan inilah yang berkontribusi pada perubahan kuasabudaya di masyarakat Saudi. Dinamika ini tidak diakui oleh para ilmuwan orientalis yang memperlakukan Kerajaan Arab Saudi tidak sesuai dengan perubahan. Tujuan utama disertasi ini adalah untuk menganalisis wacana moderasi dari dua kecenderungan pemikiran yang menonjol, yang disebut di sini ‘pragmatis’ (bukan liberal) dan ‘puritanis’ (tidak konservatif). Melalui investigasi

---

<sup>52</sup>Yasmin Salem, “Transnational Islamism And Political Moderation: A Comparative Analysis Of Egypt And Morocco” (*Dissertation*, Florida, Florida Atlantic University, 2015).

<sup>53</sup>Eid AL Yahya, “Moderation in the Kingdom of Saudi Arabia: An Analysis of ‘Pragmatist’ and ‘Puritanical’ Discourses” (*Dissertation*, Exeter, University of Exeter, 2011).

ini adalah nilai-nilai utama yang mereka asosiasikan dengan moderasi menjadi jelas.

Disertasi ini menggunakan analisis wacana data primer baik lisan maupun tulisan. Dua sumber gabungan ini mengungkapkan sejumlah pengamatan awal. Tren pragmatis tidak sepenuhnya sekuler dan masih dipengaruhi oleh identitas politik-keagamaan Kerajaan. Wacana moderasinya bergantung pada nilai-nilai dan konsep-konsep Barat tetapi nilai-nilai dan konsep-konsep ini sama sekali tidak anti-Islam. Tren puritanis menempatkan tradisi politik-agama ke dalam fokus yang lebih tajam, menunjukkan keterikatan pada agenda dakwah dan kerangka kerja normatif dari tatanan sosial-moral Islam. Namun, tren ini menunjukkan tanda-tanda moderat yang tidak lagi peduli dengan masalah jihad, dan sedang merambah ke bidang reformasi politik yang berkaitan dengan pemerintahan yang adil, kewarganegaraan yang sama, dan bentuk inklusivitas dalam sistem normatif Islam.<sup>54</sup>

*Ketiga*, disertasi yang ditulis Rachel Anne McCarthy, *The Controversial Moderate: Tariq Ramadan's Vision for Muslim Political Participation in Europe*.<sup>55</sup> Disertasi mengulas bagaimana sepak terjang Tariq Ramadan. Tariq Ramadan menjadi tokoh penting dalam debat tentang kehadiran populasi Muslim di Eropa sejak 1990-an. Tulisan akademiknya membahas tema integrasi, kepemilikan dan partisipasi Muslim di Barat, dan khususnya Eropa. Rachel dalam disertasinya ini menyimpulkan bahwasannya Ramadhan tidak mengadvokasi untuk menjatuhkan sekularisme Barat, atau mengobarkan jihad melawan Barat, tetapi berpendapat untuk kewarganegaraan Muslim yang aktif, mengklaim bahwa ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Tariq Ramadan adalah suara Muslim kontroversial namun 'moderat' tentang penciptaan ruang yang layak bagi Muslim Eropa untuk berpartisipasi sebagai warga negara penuh dalam masyarakat mereka. Ramadan telah menghadapi banyak kritik dari kalangan akademisi, jurnalis neoliberal, dan komunitas Muslim, dengan banyak yang mengklaim bahwa ia menyembunyikan bentuk Islam yang lebih

---

<sup>54</sup>AL Yahya "Moderation in the Kingdom of Saudi Arabia .

<sup>55</sup>Rachel Anne McCarthy, "The Controversial Moderate: Tariq Ramadan's Vision for Muslim Political Participation in Europe" (Melbourne, University of Melbourne, 2011).

ambisius di bawah jubah moderasi dan toleransi. Partisipasi politik adalah jalan yang menurut Ramadhan akan memungkinkan Muslim Eropa untuk menegaskan hak dan tanggung jawab penuh mereka sebagai warga negara.

Temuan disertasi ini menyimpulkan ada keterbatasan dalam pendekatan Tariq Ramadan untuk menghadirkan masa depan yang layak bagi partisipasi politik Muslim di Eropa. Sementara pandangan Ramadan tentang pentingnya partisipasi politik Muslim merupakan hal mendasar untuk membangun ruang publik yang layak bagi Muslim Eropa, ada ketidakkonsistenan dalam pendekatannya yang menghalangi upayanya untuk membuat kontribusi yang substansial.<sup>56</sup>

*Keempat*, riset yang dilakukan Mohd Shukri Hanapi, yang berjudul *The Wasatiyyah (Moderation) Concept in Islamic Epistemology: A Case Study of Its Implementation in Malaysia*. Penelitian Hanapi mencoba memotret realitas moderasi Islam di Malaysia. Konsep moderasi Islam yang sejalan dengan aspirasi Pemerintah Malaysia untuk mempromosikan persatuan di antara orang-orang dari ras yang berbeda dan untuk menahan diri dari pergolakan sosial, pemerintah Malaysia menggunakan konsep al-wasatiyyah dalam suatu pendekatan untuk mengimplementasikan Gagasan 1Malaysia (Konsep 1Malaysia).<sup>57</sup> Penelitian ini adalah untuk menentukan apa konsep wasatiyyah dalam epistemologi Islam; dan kedua, menganalisis implementasinya di Malaysia. Penelitian kualitatif ini menggunakan desain eksploratif dan deskriptif dengan menggunakan metode analisis isi. Metode analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis konsep al-wasatiyyah dalam epistemologi Islam dan implementasinya di Malaysia.

*Kelima*, kajian pustaka yang selanjutnya ialah riset yang dilakukan Rahmat Kamal, dengan judul; *Internalization of Moderate Islamic Values in Education*. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki esensi dan nilai-nilai Islam moderat dan menginternalisasikannya dalam proses pendidikan. Penelitian

---

<sup>56</sup>*Ibid.*

<sup>57</sup>Mohd Shukri Hanapi, "The Wasatiyyah (Moderation) Concept in Islamic Epistemology: A Case Study of Its Implementation in Malaysia," *International Journal of Humanities and Social Science* 4, no. 9 (1) July (2014).



ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan penelitian perpustakaan. Studi ini menyoroiti ketidakseimbangan antara konsep ajaran Islam yang menunjukkan nilai-nilai moderat dan tindakan yang mengikis nilai-nilai Islam moderat. Rahmat Kamal menyimpulkan dari hasil temuannya yaitu: (1) Islam moderat mengacu pada bentuk Islam yang menekankan dan menyeimbangkan nilai-nilai moderasi antara kelompok fundamentalis dan kelompok ekstremis. (2) Nilai-nilai Islam moderat meliputi nilai-nilai toleransi dalam menunjukkan sikap, nilai toleransi dalam menghormati perbedaan, nilai inklusivitas dalam menerima sesuatu yang baru dengan banyak kekuatan, nilai logika dan fleksibilitas dalam memahami teks. (3) proses internalisasi meliputi tiga tahap, yaitu: tahap transformasi nilai, nilai transaksi, dan trans-internalisasi. Tahap pertama berupaya dengan proses yang dilakukan oleh guru dalam menginformasikan nilai-nilai moderasi dikonseptualisasikan dalam ajaran Islam.<sup>58</sup>

*Keenam*, riset Musawar dengan judul *Moderate Islam As A Solution to Pluralism In The Islamic World: The Experience of Indonesia*. Riset Musawar yang mengambil objek penelitian di Indonesia sebagai tempat penelitiannya, salah satu alasan yang ia pilih ialah Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia sedang berusaha melindungi diri dari ancaman yang tidak diinginkan, terutama dari radikalisme dan perpecahan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia melalui dua organisasi keagamaan yang paling dominan, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, telah mengembangkan Islam moderat sebagai respons terhadap keragaman multikultural dan multireligiusnya. Islam moderat didasarkan pada ajaran Ahl Sunnah wa al-Jamaah di bidang hukum, teologi, dan mistisisme yang ditandai oleh toleransi, moderasi, dan penerimaan terhadap keberadaan orang lain. Model Islam moderat yang diikuti oleh dua organisasi keagamaan ini telah diterima secara global melalui pembukaan cabang mereka di beberapa negara Barat dan Timur Tengah, sehingga membuktikan bahwa itu bisa menjadi solusi untuk menciptakan perdamaian dan harmoni di dunia.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>Rahmat Kamal, "Internalization of Moderate Islamic Values in Education," *Islamic Studies Journal for Social Transformation*, June 13, 2017, 67–80, <https://doi.org/10.28918/isjoust.v1i1.1142>.

<sup>59</sup>Musawar et al., "MODERATE ISLAM AS A SOLUTION TO PLURALISM

*Ketujuh*, riset yang dilakukan Zaenuddin Hudi Prasajo, Elmansyah Elmansyah, and Muhammed Sahrin Haji Masri, dengan judul *Moderate Islam and the Social Construction of Multi-Ethnic Communities in the Hinterland of West Kalimantan*. Penelitian ini dilakukan di Kalimantan Barat dan fokus penelitian ini mengenai “konstruksi sosial” yang di dalamnya mengurai persoalan budaya serta interaksi antar etnis yang ada di daerah Kalimantan Barat. Hasil penelitian ini menggambarkan tentang peluang dan tantangan potensi lokal daerah. Selain itu riset ini menyingkap mengenai ekspansi agama Islam di Kalimantan Barat setelah kerajaan-kerajaan Islam mulai tidak eksis lagi. Budaya lokal yang tumbuh subur dapat diterima dengan ajaran Islam. *Local wisdom* dari kalangan masyarakat dalam bentuk kepercayaan terhadap kuliner yang dapat menumbuhkan jiwa sosial dan kekeluargaan, budaya lokal ini menjadi modal untuk menumbuhkan kecintaan terhadap alam semesta sebagai kunci kesuksesan.<sup>60</sup>

*Kedelapan*, yang dijadikan kajian pustaka terkait moderasi Islam dalam penelitian ini menilik dari beberapa riset yang akhir-akhir ini dipublikasikan di antaranya yaitu dalam prosesi pengukuhan guru besar seperti, Abdul Mustaqim,<sup>61</sup> Haedar Nasir,<sup>62</sup> Biyanto,<sup>63</sup> Toto Suharto,<sup>64</sup> kajian pustaka yang ada setidaknya dijadikan acuan bagi peneliti untuk memposisikan penelitiannya dan mencari celah yang muncul dari beberapa penelitian yang ada, sehingga muncul kebaruan dalam penelitian ini.

*Research Gap* pada penelitian ini bila dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan yaitu dilihat dari beberapa aspek *Pertama*: Penelitian-penelitian terdahulu belum

---

IN THE ISLAMIC WORLD: THE EXPERIENCE OF INDONESIA.” *Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)*, November 29, 2019, 1–24.

<sup>60</sup>Zaenuddin Hudi Prasajo, Elmansyah Elmansyah, and Muhammed Sahrin Haji Masri, “Moderate Islam and the Social Construction of Multi-Ethnic Communities in the Hinterland of West Kalimantan,” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no. 2 (December 25, 2019): 217–39, <https://doi.org/10.18326/ijims.v9i2.217-239>.

<sup>61</sup>Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*.

<sup>62</sup>Nashir, “Moderasi Indonesia Dan Keindonesiaan; Perspektif Sosiologi.”

<sup>63</sup>Biyanto, “Antara Deradikalisasi Dan Moderasi Perspektis Filsafat Kritik Ideologi” (Orasi Ilmiah, Surabaya – Indonesia, 2020).

<sup>64</sup>Suharto, “Remoderasi Pendidikan Islam Di Indonesia: Tantangan Ideologis.”

ada yang secara khusus menganalisa kebijakan kementerian agama terkait program moderasi beragama dari pelbagai dimensi yang akhir-akhir ini mulai marak didengungkan para pemangku kebijakan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Riset yang sudah ada selama ini dalam pandangan penulis hanya masih berkuat pada aspek konsep ideal moderasi beragama, belum mengarah pada aspek regulasi dan formulasi kebijakan.

*Kedua;* penelitian terdahulu belum ada yang mengulas tentang analisis kebijakan dilihat dari aspek efektivitas kebijakan moderasi beragama, penelitian terdahulu masih banyak mengulas terkait dengan “promosi” dan urgenitas moderasi beragama dalam berbagai kepentingan. *Ketiga;* Penelitian yang dilakukan peneliti ini dibandingkan penelitian-penelitian yang dahulu yaitu penelitian ini tidak hanya “memotret” bagaimana peran kementerian agama dalam mempromosikan moderasi beragama di lingkungan Perguruan Tinggi dan bagaimana dalam implementasinya di lingkup Perguruan Tinggi, lebih dari itu penelitian ini juga mencoba menemukan bagaimana resepsi perguruan tinggi dalam kebijakan moderasi beragama dan yang paling penting ialah seberapa efektifkah program kebijakan moderasi beragama berjalan di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

## **F. Kerangka Teoritis**

Untuk menganalisa tema riset ini mengenai Politik Kebijakan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Resepsi, Negosiasi dan Model Implementasi di PTKIN maka dalam riset ini menggunakan tiga teori sebagai “pisau” untuk menganalisis realitas yang berkembang. Pertama dalam menganalisis terkait kebijakan moderasi beragama, peneliti menggunakan teori kebijakan publik dari William N Dunn, kedua teori Grindle yang terkait dengan interpretasi kebijakan, sebagai alat untuk membaca peran perguruan tinggi dalam implementasi moderasi beragama. Ketiga teori implementasi kebijakan Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn sebagai pisau analisis interaksi kebijakan pada tingkat makro maupun mikro, untuk membedah interaksi kebijakan yang ada di tingkat pusat maupun yang ada di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pertama, Teori kebijakan publik yang diutarakan William N Dunn, ia menganggap bahwasannya kebijakan publik merupakan



daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan, yang disusun oleh lembaga atau institusi pemerintahan.<sup>65</sup> Senada dengan pendapat William Dun, Thomas R Dye mengungkapkan bahwasannya kebijakan publik merupakan segala pilihan yang dipilih pemerintah baik itu yang dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan.<sup>66</sup> Dalam riset ini teori kebijakan publik digunakan untuk menganalisis isi muatan kebijakan Kementerian Agama terkait kebijakan dalam mengejawantahkan moderasi beragama, teori ini digunakan untuk membedah bagaimana kebijakan ini terwujud, mengapa dan dampak apa yang ditimbulkan dari kebijakan ini.

Kedua, Teori rindle Teori Merilee S. Grindle (1980), teori ini sangat ditentukan oleh konten kebijakan dan konteks implementasinya, teori ini mempunyai karakteristik setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Maka keberhasilan suatu kebijakan ditentukan dari derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan harus mencakup beberapa kriteria di antaranya; kepentingan yang dipengaruhi kebijakan, derajat perubahan yang diinginkan, kekuasaan kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dan kepatuhan daya tanggap. Teori Grindle ini memiliki keunikan tersendiri yaitu memiliki daya pemahaman yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi dan kondisi konflik yang dimungkinkan terjadi diantara para aktor implementasi kebijakan.<sup>67</sup>

Ketiga teori implementasi kebijakan Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn teori yang digunakan dalam mengimplementasikan kebijakan dengan menggunakan "*he top down approach*" untuk dapat mengimplementasikan suatu kebijakan secara sempurna (*Perfect implementation*) (Hogwood & Gunn, 1984). Selain itu teori yang diutarakan Van Meter dan Van Horn yang mempertanyakan tentang mengapa ada implementasi kebijakan yang gagal dan ada implementasi kebijakan yang berhasil, dalam pandangannya keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi antara kebijakan dengan kinerja kebijakan itu sendiri.<sup>68</sup> Teori ini digunakan

---

<sup>65</sup>William N Dun, *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2002).

<sup>66</sup>Thomas R Diye, *Understanding Public Policy* (Singapore: Longman, 2011).

<sup>67</sup>Goggin, Bowman, Lester, dan O'Toole Jr., *Implementation Theory and Practice: Toward A Third Generation*, dalam H.A.R Tilaar and Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 2019.

<sup>68</sup>Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke*

untuk mengukur keefektifan dari suatu produk kebijakan yang sudah diimplementasikan, dalam hal ini yaitu terkait dengan kebijakan moderasi beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif kritis, deskriptif (eksploratif) yaitu penelitian yang berlandaskan pada pengamatan secara obyektif partisipatif terhadap suatu kejadian atau fenomena sosial yang berkembang di institusi atau masyarakat atau kelompok komunitas. Peneliti dalam hal ini mendesain atau membuat gambaran yang makin nyata dan jelas sementara data dikumpulkan dan bagian-bagiannya diuji dengan teknik yang ada.<sup>69</sup> Penelitian lapangan memiliki karakteristik natural dan merupakan kerja lapangan yang bersifat deskriptif-analisis.<sup>70</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu dengan teknik informasi yang berupa data yang didapatkan di lapangan dengan suatu metode dilengkapi, diperkuat, dan disempurnakan dengan penggunaan metode lain seperti *interview*, pengamatan, dan proses dokumentasi di lapangan.

Jenis data yang digunakan dalam riset ini adalah data kualitatif yang dilakukan melalui *deep interview* sebagai usaha dalam menelusik menggali informasi sebanyak mungkin terhadap pihak-pihak yang mempunyai kapasitas dan kompetensi. Dalam hal ini yang berkompeten memberikan informasi mengenai model implementasi moderasi beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.<sup>71</sup> Penelitian kualitatif secara detail menggali fenomena alamiah yang terjadi objek penelitian tidak mengkondisikan keadaan ketika sedang penelitian.<sup>72</sup> Dalam penelitian kualitatif

---

*Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).

<sup>69</sup>Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), 104.

<sup>70</sup>Bernard Russell, *Research Methods in Anthropology* (London- New Delhi: Sage Publication, 1994), 65.

<sup>71</sup>Robert Bogdan and Sari Knop Biklen, *Qualitative Research For Education: And Introduction to Theories and Methods* (Boston: Allyn and Bacon, 1992), 67.

<sup>72</sup>Anselm Strauss and Juliet Corbin, *Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory* (California: Sage Publication, 1998), 98.

diasumsikan sebagai penelitian interpretatif.<sup>73</sup> Sejalan dengan argument Taylor dan Bogdan mengatakan bahwa “*qualitative methodologies refer to research procedures which produce descriptive data: people’s own written or spoken words and observable behavior.*”<sup>74</sup>

Salah satu karakteristik yang mendasari penelitian kualitatif adalah bahwa dunia pada umumnya, realitas, situasi, maupun kejadian atau peristiwa yang terjadi sebagai objek studi tentang perilaku manusia maupun fenomena harus didekati dan dilihat melalui pendekatan humanistik.<sup>75</sup> Sedangkan analisa di dalamnya lebih dekat menggunakan analitik deskriptif. Analitik deskriptif di sini memiliki ciri-ciri data yang dikumpulkan banyak yang dalam bentuk kata-kata. *Unit of analysis* dalam penelitian ini yaitu Politik Kebijakan Moderasi Beragama di PTKIN, Resepsi, Negosiasi dan Model implementasi.

## 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, IAIN Kudus, UIN Walisongo Semarang. Pemilihan lokus penelitian ini berdasarkan pengamatan awal peneliti bahwa tiga perguruan tinggi ini memiliki perhatian yang lebih dalam isu moderasi beragama, selain itu dilihat dari sosio-kultural kemasyarakatan yang ada tiga perguruan tinggi ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Penelitian dimulai pada bulan Agustus 2020-Juli 2021, adapun jadwal pelaksanaan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut;

**Tabel 1. 2 Jadwal Agenda Pelaksanaan Penelitian**

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN (BULAN)														
		8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7			
1	Perencanaan dan perbaikan proposal															
2	Observasi lapangan															
3	Pengumpulan data															

<sup>73</sup>John W Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

<sup>74</sup>Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Erlangga, 1999).

<sup>75</sup>Nasution S, *Metode Penelitian Naturalistik* (Bandung: Tarsito, 1998), 66.



mengalaminya. Teknik yang digunakan adalah teknik sampel bertujuan (*purposeful sampling*), dan dari teknik tersebut peneliti menggunakan jenis *snowball sampling*.<sup>78</sup> Penentuan informan dalam penelitian ini didasarkan pada kapabilitas, kapasitas dan pengalaman individual dalam bidang moderasi beragama. Setidaknya dalam penelitian ini penentuan informan didasarkan atas dasar bahwa informan mengalami, memahami, dan mengerti akan kaitannya moderasi beragama di lingkungan IAIN Kudus, IAIN Surakarta, dan UIN Walisongo.

Dalam proses penelitian ini, peneliti mencoba menggunakan tiga teknik pengumpulan data sebagai metode mengumpulkan data yang ada di lapangan, di antaranya:

a. Wawancara

Proses wawancara diartikan sebagai suatu interaksi antara peneliti dengan narasumber, yang interaksi ini di dalamnya terdapat berbagai aturan yang disepakati antara kedua belah pihak dalam proses wawancara. Dalam proses wawancara, peneliti tidak hanya dibatasi pada satu narasumber saja, melainkan dapat melebarkan sayap kepada narasumber yang lain yang mempunyai kapasitas dalam bidang yang diteliti.<sup>79</sup> Sedangkan Mulyana menjelaskan bahwa, "proses wawancara merupakan bentuk interaksi komunikatif antara dua orang, yang mana satu orang dalam rangka mendapatkan informasi dan data sebagai bahan yang akan diolah dalam penelitian."

Wawancara dalam hal ini dilakukan dengan civitas IAIN Surakarta, IAIN Kudus, UIN Walisongo, Dosen, dan pejabat. Tujuannya agar mendapatkan pengetahuan yang utuh dari berbagai kalangan yang terlibat dalam penelitian ini, di antaranya Prof. Dr. Mudhofir Abdullah, S. Ag., M.Pd, Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag, Dr. Ma'mun Mu'min, M. Ag, Dr. Imam Yahya, M. Ag, Dr. M Zainal Anwar, M. Ag, dan lain sebagainya. Kemudian hasil wawancara dikaitkan dengan data dan dokumen serta melakukan penelusuran literatur terkait moderasi beragama di perguruan tinggi keagamaan Islam.

---

<sup>78</sup>Marguerite G. Lodico Dean T and Katherine H. Voegtler Spaulding, *Methods In Educational Research: From Theory To Practice* (San Francisco: Jossey-Bass, 2006).

<sup>79</sup>Haris Hardiyansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 113.

Dalam prosesnya teknik wawancara di sini peneliti lakukan menjadi beberapa bagian.<sup>80</sup> Pertama peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur (*structured interview*); Kedua, wawancara semi terstruktur; Ketiga, wawancara tidak terstruktur.

b. Observasi

Observasi (*observation*) adalah suatu proses dalam suatu penelitian yang merupakan teknik atau cara dalam pengumpulan data. Teknik yang dilakukan dalam proses observasi yaitu dengan cara mengamati suatu fenomena atau kegiatan yang berkaitan dengan penelitian secara langsung.<sup>81</sup> Metode ini bertujuan untuk melihat secara nyata objek penelitian yang diteliti, dan bagaimana realitas politik pendidikan tinggi dan model moderasi Islam di IAIN Surakarta, IAIN Kudus, dan UIN Walisongo. Observasi dilakukan di tiga perguruan tinggi yang diteliti, observasi dipusatkan pada pusat Rumah Moderasi masing-masing kampus dengan mengamati program-program apa saja yang digulirkan di masing-masing Rumah Moderasi. Dari hasil observasi ditulis dalam catatan lapangan diberi kode-kode tertentu guna untuk mempermudah dalam membaca dan menganalisis data dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui benda-benda yang dapat dibaca dan menjadi dokumen yang dimiliki objek lapangan seperti peraturan, produk kebijakan, buku, dokumen, dan lain sebagainya.<sup>82</sup> Penelaahan dokumen yang dimiliki akan lebih memperdalam data dan informasi yang didapat.<sup>83</sup> Dokumen disini juga dapat diartikan segala data yang ada di sekitar lapangan dalam bentuk tertulis, visual, maupun objek yang memiliki nilai dalam penelitian ini. Metode dokumentasi ini peneliti lakukan untuk menggali

---

<sup>80</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), 63.

<sup>81</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 300.

<sup>82</sup>Amirul Hadi and Haryono, *Metode Penelitian Pendidikan 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 89.

<sup>83</sup>Max Travers, *Qualitative Interviewing Methods*, Dalam Maggie Walter (Ed) *Social Research Methods*, Second Edition (New Zealand: Oxford University Press, 2010). 292



program-program apa saja yang digulirkan oleh Kementerian Agama terkhusus Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (DIKTIS Kemenag) dalam menerjemahkan program moderasi beragama di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri.

Selain untuk menggali program-program yang terkait moderasi beragama, metode dokumentasi mencoba memotret sektor riil Rumah Moderasi Beragama peran apa saja yang dilakukan IAIN Surakarta, IAIN Kudus, UIN Walisongo dalam bidang sosial maupun pendidikan dalam kaitannya dengan moderasi beragama di lingkungan masing-masing.

##### 5. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam kerja penelitian dimulai dari menyusun, mengatagorikan, mencari pola atau tema dengan pencarian-pencarian (*question research*).<sup>84</sup> Proses analisis data dalam suatu penelitian dilakukan secara ajeg dari awal penelitian dimulai dan sepanjang penelitian. Walhasil, mulai proses pencarian data dan ditemukan data yang diinginkan yang didapatkan dari proses dokumentasi. Proses pengumpulan data sebagai cara juga langsung dianalisis dan dipelajari, dikroscek kebenarannya dengan sumber-sumber data yang lain dan disimpulkan. Hal ini dilakukan secara terus menerus secara konsisten hingga penelitian ini selesai.

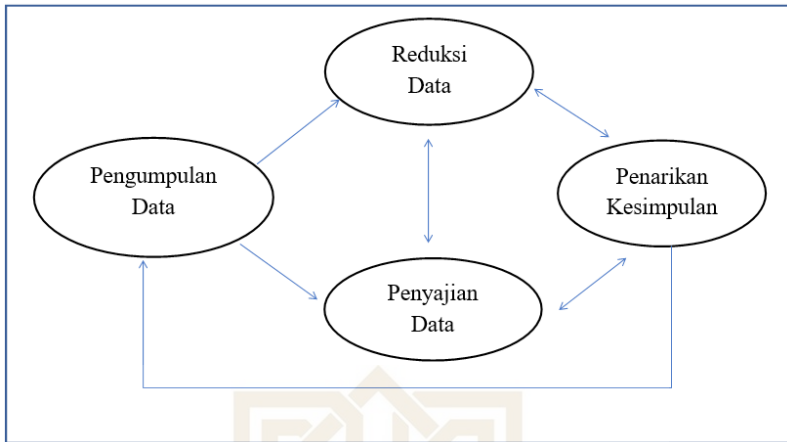
Pendekatan peneliti terhadap data yang ada dimaksudkan untuk menggali informasi yang dalam pada data yang ada, serta menangkap fenomena dari apa yang diteliti dari interpretasi minimal.<sup>85</sup> Dalam penelitian kualitatif, dalam menyimpulkan data yang diperoleh di lapangan supaya dapat diambil kesimpulan atau makna yang valid, bisa menggunakan teknik sebagaimana yang dipaparkan Miles dan Huberman dalam konteks analisis data kualitatif yang terdiri dari tiga alur yang terjadi secara bersamaan seperti dalam gambar berikut.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup>James P Spradley, Participant Observation (New York: Holts, Rinehart and Winston, Pub. Inc, 1980), 34.

<sup>85</sup>Pamela Maikut and Richard Norehous, Begining Qualitatif A Research Philoshopyand Practical Guide (London: Washington, Dc, 1994), 125.

<sup>86</sup>Mathew B Miles, A.M Huberman, and Johnny Saldana, Qualitative Data Analysis: A Methods, Sourcebook, Third Edition (Thousand Oaks, California: Sage Publication, inc, 2014).



Gambar I.1 Analisis Data Model Interaktif

a. Reduksi data

Reduksi data ialah proses dalam suatu penelitian dalam rangka memilah dan memilih dan menentukan berbagai data yang diperoleh diperas dan diringkas sedemikian mungkin dan disederhanakan agar pengolahan data lebih mudah dan efisien. Secara sederhana reduksi data ini dikemas dalam bahasa yang mudah difahami dan detail. Selain itu dibedakan beberapa hal yang urgen dan pokok dibuat sedemikian detail agar mudah dalam mendefinisikan data yang diperoleh dari lapangan agar lebih mudah dipahami.

b. Penyajian data atau display data

Display data adalah proses dalam suatu penelitian dengan cara penyusunan informasi yang didapat dari lapangan yang bersifat umum dikemas dalam model yang lebih sistematis dan rinci, walhasil informasi dan data menjadi lebih mudah dipetakan berdasarkan bobot kepentingan masing-masing, serta mudah dimengerti peneliti. Dengan display data ini akan membantu peneliti untuk dapat melihat gambar keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data hasil penelitian. Dalam hal ini peneliti membuat matrik untuk data, agar peneliti dapat menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukan data.

6. Mengambil kesimpulan atau verifikasi

Proses Verifikasi data ialah merupakan proses terakhir yang dilakukan peneliti sebagai proses penyimpulan dari proses



analisis data. Pada awalnya kesimpulan bisa dibuat longgar dan terbuka kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar pada pokok temuan. Dalam proses verifikasi peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk mendalami dan menafsirkan data yang ditemukan. Maka dari itu itu dalam proses ini diharapkan dapat menemukan pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dalam suatu penelitian. Walhasil dari data yang ditemukan di lapangan seorang peneliti wajib harus selalu mengecek dan mengambil kesimpulan dan diverifikasi secara intens selama dalam proses penelitian.<sup>87</sup>

Kegiatan analisis mempunyai keterkaitan dan saling menguatkan dalam suatu proses penelitian. Dari itu dapat disimpulkan bahwa analisis ialah proses yang dilakukan secara ajeg dan terus menerus. Proses ini sebagai bentuk “*auditing*”, maka dalam kegiatan ini perlu dirangkum dalam catatan-catatan yang sistematis agar mempermudah peneliti dalam proses penelitian yang sedang dilakukannya.

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memperoleh data yang obyektif, diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan pada derajat kepercayaan (*kredibilitas*). Penerapan derajat kepercayaan ini berfungsi untuk membuktikan bahwa apa yang sudah didapatkan dari lapangan dan dikumpulkan oleh peneliti sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian.

Menurut Lexy J. Moloeng, terdapat tiga dari tujuh kriteria kredibilitas dari teknik pemeriksaan. Yaitu ketekunan pengamatan, triangulasi dan perpanjangan keikutsertaan peneliti.<sup>88</sup>

##### a. Ketekunan pengamatan atau kedalaman observasi

Ketekunan pengamatan di sini dalam suatu penelitian sebagai usaha untuk mendapatkan ciri-ciri dan unsur-unsur yang ada dalam situasi tertentu yang sangat relevan dengan topik atau bahasan yang sedang diteliti atau isu yang sedang dicari yang setelah itu mengfokuskan diri pada temuan-temuan yang ada secara cermat dan teliti. Dengan proses ini pengamatan dan kedalaman observasi peneliti meminta para informan untuk

<sup>87</sup>Nasution S, *Metode Penelitian Naturalistik* (Bandung: Tarsito, 1998), 129.

<sup>88</sup>Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), 326.

menelaah ulang, mereduksi dan menambah informasi yang dinilai kurang sesuai dengan pemahaman informan. Hasil data yang diperoleh di lapangan harus dikroscek kepada orang yang dimintai keterangan untuk mentashih informasi yang sudah ditemukan, catatan yang diberikan informan dijadikan pijakan dalam memperbaiki catatan lapangan yang sudah didapatkan.

b. Triangulasi

Triangulasi ialah yaitu teknik yang digunakan dalam proses penelitian dengan cara pemeriksaan keabsahan data dengan teknik mengambil manfaat dari sesuatu yang berada di luar data itu yang dijadikan sebagai pembanding terhadap data yang sudah ditemukan di lapangan. Proses triangulasi seringkali menggunakan data atau sumber lain sebagai kroscek dan pembanding dari data yang sudah ada.<sup>89</sup> Triangulasi dengan sumber mempunyai artian mendudukkan dan membandingkan serta mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi atau data yang didapatkan di lapangan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

c. Perpanjangan Keikutsertaan

Sebagai ciri-ciri penelitian kualitatif yaitu peneliti sebagai instrumen pengumpulan data. Keikutsertaan peneliti sangatlah menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian.<sup>90</sup>

Perpanjangan keikutsertaan secara tidak langsung dapat meningkatkan derajat kevalidan data yang dikumpulkan, karena peneliti dapat menguji ketidakbenaran observasi yang diperkenalkan oleh distorsi, baik yang berasal dari peneliti maupun dari responden dan membangun kepercayaan subyek. Hal ini sebagai upaya mendeteksi dan memperhitungkan meminimalisir distorsi yang mungkin mengotori data penelitian.

## H. Sistematika Pembahasan

Disertasi ini dirangkai dalam enam Bab pembahasan sebagai pijakan dalam berfikir secara kritis dan sistematis. Setiap bab dalam

---

<sup>89</sup>*Ibid.*, 128.

<sup>90</sup>Hadi, *Metodologi Research*, 43.

pembahasan ini terdiri dari beberapa sub bagian yang akan menjawab dari rumusan masalah yang sudah dipetakan. Adapun rancangan sistematika pembahasan riset ini sebagai berikut;

Bab Pertama dalam disertasi ini memuat tentang pendahuluan yang merupakan gambaran umum isi penelitian yang terdiri dari: latar belakang masalah, Metode penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian. originalitas penelitian, kerangka teoritik, Tinjauan Pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan jawaban akan rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai Bagaimanakah potret politik pendidikan tinggi di Indonesia, terkhusus pendidikan tinggi yang bernaung di bawah Kementerian Agama, dinamika pengembangan, tantangan sosial, politik yang mengitarinya.

Bab tiga berisi mengenai Moderasi Beragama, Kebijakan Publik dan dinamika Politik Identitas yang terjadi lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, dalam pembahasan ini juga mengulas mengenai seluk beluk dan urgenitas moderasi beragama, mulai dari konsep, indikator, landasan religius dan landasan formal.

Bab empat berisi tentang kebijakan moderasi beagama resepsi, negosiasi dan tantangan lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Pada bahasan ini mengulas juga terkait kebijakan yang dikeluarkan kementerian agama dalam bidang pendidikan kaitannya dengan Moderasi Beragama, selain itu dalam bahasan ini memuat tentang profil Rumah Moderasi Beragama di IAIN Surakarta, IAIN Kudus dan UIN Walisongo,

Bab lima berisi mengenai moderasi beragama, model implementasi dan dampak sosial akademik di pendidikan tinggi keagamaan islam. Dalam pembahasan ini akan mengulas secara detail bagaimana implementasi moderasi beragama di tiga lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, yang dilanjutkan dengan evaluasi program dengan memaparkan dampak sosial akademik dalam implementasi moderasi beragama yang sudah dilakukan selama ini.

Bab enam memuat simpulan dari penelitian yang berjudul Politik Kebijakan Moderasi Beragama Resepsi, Negosiasi dan Model Implementasi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Dalam bab ini ditekankan berbagai simpulan dari rumusan masalah dan hasil temuan penelitian serta rekomendasi dari penelitian yang sudah dilakukan.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Politik dan pendidikan sebagai entitas yang berdiri sendiri-sendiri, dalam perjalanan waktu dua entitas ini saling mempengaruhi dan dipengaruhi satu dengan yang lainnya sebagai konsekuensi logis akan keberadaannya. Dunia pendidikan hampir tidak mungkin jika ingin bebas lepas dari dunia politik. Dunia politik mempunyai otoritas yang kuat untuk mengarahkan dan mendesain warna pendidikan sesuai dengan harapan yang diinginkan melalui produk regulasi dan kebijakan yang mampu mengkoordinasikan elemen-elemen dalam sistem pendidikan.

Kewenangan dan keleluasaan penguasa dalam mengatur dan mengarahkan dunia pendidikan sesuai dengan visi misi yang diharapkan dengan mendesain suatu produk kebijakan yang mampu mengakomodir semua harapan pemegang otoritas. Kebijakan pendidikan sebagai produk dari politik pendidikan secara umum dalam ilmu kebijakan publik dapat dikategorikan menjadi lima tingkatan yaitu; kebijakan ideal, kebijakan institusional, kebijakan strategis, kebijakan administratif, kebijakan operasional. Dalam hal ini kebijakan moderasi beragama dalam tataran teknis sudah melewati tahapan-tahapan kebijakan yang ada di atas.

Moderasi beragama dalam perspektif politik pendidikan dapat dilihat dari; Pertama telaah makro pada proses dan produk kebijakan mulai dari bagaimana kebijakan moderasi beragama dirumuskan hingga menjadi suatu produk kebijakan. Kebijakan moderasi beragama merupakan produk politik otoritas yang berkuasa yang mana kebijakan ini secara idealitas menjembatani kelompok kepentingan keagamaan ekstrimis kanan dengan kelompok kepentingan ekstrimis kiri, mengarah pada titik pertengahan yang saling memberikan ruang dan tempat untuk saling memahami. Titik yang dituju dalam kebijakan moderasi beragama yaitu titik *washatiyah* (pertengahan) yang merupakan tujuan utama akan adanya kebijakan moderasi beragama yang memiliki karakteristik adil, berimbang, bijaksana dan menjunjung tinggi harkat kemanusiaan.

Kedua, ditelaah pada tataran mezzo pada implementasi kebijakan moderasi beragama yang ada di lapangan. Dalam hal ini bagaimana implementasi moderasi beragama di lingkungan pendidikan tinggi keagamaan Islam, merancang dan mendesain pola internalisasi moderasi beragama di tingkat perguruan tinggi. Pola yang ingin dikembangkan inilah yang menjadi acuan dalam mendiseminasikan program kelanjutan kebijakan moderasi beragama di lingkungan perguruan tinggi yang dimilikinya. Yang ketiga adalah telaah mikro dilihat dari pengelolaan dan penyelenggaraan tingkat satuan pendidikan, dalam hal ini peran dan optimalisasi rumah moderasi beragama di masing-masing lembaga pendidikan tinggi Islam sangat menentukan dalam keberhasilan kebijakan moderasi beragama di lingkungan perguruan tinggi.

Dalam tataran mikro ini rumah moderasi beragama mempunyai “*freedom of choice*” kemerdekaan untuk memilih. Kebebasan dalam hal ini bukan berarti kebebasan untuk tidak menerapkan kebijakan moderasi beragama atau tidak menerapkannya akan tetapi, kebebasan dalam hal ini yaitu dalam ranah desain implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam mendiseminasikan moderasi beragama di perguruan tinggi keagamaan Islam. Dalam kaitannya dengan kebijakan moderasi beragama model ini disebut sebagai *paternalism libertarian* yaitu memberikan peluang kepada objek untuk melewati hukum atau beberapa bentuk aturan lain untuk bertindak sesuai dengan kondisi dan keadaan yang dimilikinya, atau mencoba memengaruhi pihak yang terpengaruh sehingga ia memilih pilihan yang lebih baik, tanpa memaksa mereka berbuat sesuatu atau tanpa memaksa mereka melakukan sesuatu atau mencegah mereka melakukan sesuatu.

Dari model relasi kebijakan pendidikan dengan kebijakan publik jika digunakan sebagai pisau analisis dalam kebijakan moderasi beragama di lingkungan Kementerian Agama, maka kebijakan moderasi beragama menjadi kebijakan publik yang ditunjang dengan kebijakan pendidikan melalui kebijakan kelembagaan yang ada di Kementerian Agama melalui berbagai satker yang dimilikinya. Moderasi beragama menjadi salah satu produk kebijakan publik yang sekaligus menjadi kebijakan pendidikan yang mempunyai target dalam jangka waktu yang ditentukan. Target dan tujuan kebijakan publik ataupun kebijakan pendidikan dalam dunia perpolitikan mempunyai dua dimensi yang diperjuangkan, pertama ialah mempertahankan,

yang kedua membangun. Mempertahankan bukan berarti menjaga *status quo*, namun sebagai upaya membangun tertib hukum dalam arti luas bagi publik, sebagai dasar yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan harapan yang sesuai yang dikehendaki Negara.

Kementerian Agama sebagai *leading sector* dalam kebijakan moderasi beragama secara nasional mempunyai kewajiban untuk menerjemahkan kebijakan moderasi beragama di lingkungan Kementerian Agama. Setidaknya secara umum upaya yang dilakukan Kementerian Agama dalam menyukseskan kebijakan moderasi beragama terdapat tiga pola yang dilakukannya; *pertama* sosialisasi gagasan, pengetahuan, dan pemahaman tentang moderasi beragama kepada masyarakat, kedua pelembagaan moderasi beragama ke dalam program dan kebijakan yang mengikat, ketiga mengintegrasikan rumusan moderasi beragama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dalam pengimplementasian moderasi beragama terdapat dua tipe strategi yang dominan dalam mendiseminasikan nilai moderat di perguruan tinggi Islam, yaitu strategi struktural dengan melembagakan dan membuat aturan legal penyelenggaraan moderasi beragama di PTKIN. Yang kedua strategi kultural Inisiasi, Sosialisasi, Internalisasi, Habitiasi, Stabilisasi. Dalam tataran implementasi moderasi beragama di lingkungan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Dalam ranah pengajaran terdapat tiga model yang digunakan pertama menjadikan moderasi beragama sebagai *worldview* dan menjadikan moderasi beragama sebagai muatan pengetahuan, sikap dan pengetahuan yang diintegrasikan dan diinternalisasikan dalam berbagai mata kuliah yang ada. Kedua, moderasi beragama dijadikan sebagai mata kuliah yang fokus dalam mengajarkan nilai-nilai keberagamaan dan isu-isu multikulturalisme dan moderasi beragama. Ketiga memaksimalkan peran rumah moderasi beragama sebagai unit atau lembaga yang konsen dengan isu-isu moderasi beragama.

Dalam bidang penelitian, internalisasi moderasi beragama diimplementasikan sebagai teknik dan cara pandang dalam pendekatan penelitian yang dilakukan di PTKIN. Selain dijadikan sebagai teknik dan strategi moderasi beragama juga menjadi objek kajian yang diteliti, dengan dikeluarkannya kebijakan tema-tema besar dalam



penelitian yang menjadikan moderasi beragama sebagai tema yang dapat diteliti dalam pelbagai perspektif keilmuan yang ada di PTKIN. Begitu juga dalam bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan baik dosen maupun mahasiswa diarahkan dan fokus pada internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai moderasi beragama kepada masyarakat.

Dampak dari implementasi kebijakan moderasi beragama dapat dilihat dari ranah idealitas konten kebijakan dalam kebijakan moderasi beragama, indikatornya ialah mengacu pada unsur yang melekat dalam diri manusia yaitu unsur individual dan sosial. Dalam mengkaji dan menganalisis idealitas kebijakan moderasi beragama di sini dapat dinilai dari relasi antara unsur individualitas dan sosial yang ada pada manusia. Keterpaduan relasi atau hubungan yang harmonis antara unsur individual dengan unsur sosial dalam interaksi kemanusiaan merupakan target utama dalam kebijakan moderasi beragama yang digaungkan Kementerian Agama. Dampak sosial dan akademis dalam implementasi moderasi beragama, secara sosial disharmoni sosial yang berlandaskan akan sentimen faham keagamaan mengancam keberagaman dan nilai kemanusiaan. Fanatisme buta pada suatu kepercayaan dan faham menjadikan tidak harmoninya interaksi sosial di dalam arena sosial masyarakat. Moderasi beragama menjadi jembatan penghubung dari ekstrimisme yang mengemuka pada faham, aliran kepercayaan, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri dan menempatkan persoalan yang ada pada posisi yang berimbang dan adil dalam berbagai perspektif. Tujuan akhir dari moderasi beragama ialah mewujudkan kedamaian dan ketentraman dalam interaksi sosial di masyarakat dapat terwujud.

Sedangkan secara akademis, moderasi beragama memberikan peluang kepada para akademisi untuk mengkaji moderasi beragama dengan berbagai perspektif dan keilmuan. Perubahan pola pendekatan yang selama ini digunakan dari monodisipliner mengarah pada multidisipliner, interdisipliner dan transdisipliner. Perubahan pola yang disasar tidak hanya sebatas pada pembelajaran semata, akan tetapi juga menyasar pada pendekatan dalam penelitian yang digunakan hingga pada pendekatan dalam bidang pengabdian kepada masyarakat sehingga semangat moderasi beragama benar-benar dapat terealisasikan dalam Tri darma perguruan tinggi.

## B. Kritik dan Saran

Moderasi beragama di tengah lingkaran “proyek” kepentingan, menelaah dan melihat *Roadmad* (peta jalan) moderasi beragama yang ada sampai pada tahun 2024 yang sudah dipublikasikan Kementerian Agama. Tujuan akhir dari kebijakan ini masih bias dan masih sangat umum yaitu “peneguhan dan apresiasi Negara dan bangsa dalam perspektif moderasi beragama”. Dalam teknisnya indikator yang ingin dicapai pada tahun 2024 yaitu pemenuhan hak-hak sipil yang berbasis moderasi beragama, tentu hal ini menimbulkan pertanyaan hak hak sipil yang seperti apa? karena hak-hak sipil (kemanusiaan) yang ada secara umum sudah diatur dalam pelbagai undang-undang dan produk hukum yang ada. Dari sini memunculkan stigma negatif bahwa moderasi beragama adalah “Proyek akbar” periode ini.

Selain itu konsep moderasi beragama didefinisikan berada di tengah-tengah di antara ekstrim kiri dan kanan yang sulit diukur secara jelas, menjadi persoalan tersendiri dalam penerjemahan moderasi beragama ke dalam aksi nyata dalam proses implementasi moderasi beragama di perguruan tinggi keagamaan Islam, walaupun dalam buku implementasi moderasi beragama yang dikeluarkan Kementerian Agama dijelaskan indikator moderasi beragama terdapat empat indikator yaitu; komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan mengakomodir budaya lokal. Wujud konkrit dari empat indikator ini masih sangat multitafsir, maka perlu diperjelas lagi kepada hal yang lebih teknis dan mudah untuk diimplementasikan.

Secara kelembagaan Rumah Moderasi Beragama di pelbagai perguruan tinggi yang ada belum jelas dimana mereka menginduk walaupun secara teknis sudah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 897 Tahun 2021 sebagai pijakan teknis kerja rumah moderasi beragama. Dalam kebijakan ini tidak disebutkan secara jelas posisi rumah moderasi beragama dimana, peraturan ini hanya mengatur nama, kedudukan, fungsi dan tugas rumah moderasi beragama, hal ini berimplikasi kepada program dan pendanaan dalam jangka panjang. Karena masih kaburnya moderasi beragama secara kelembagaan berimplikasi pada program program khususnya yang ada di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam.

Pendidikan tinggi tidak hanya sebagai lembaga pendidikan *ansich*, melainkan juga dapat berperan sebagai lembaga sosial

kemasyarakatan. Kenyataan ini memberikan penegasan bahwa keberadaan pendidikan tinggi sangat dipengaruhi dan memengaruhi lingkungan sosial yang ada di sekitar lembaga pendidikan. Maka dari itu elemen keadilan sosial dalam perumusan kebijakan pendidikan tinggi menjadi urgen, tatkala kebijakan pendidikan tinggi tidak dapat memberikan pengaruh dalam kehidupan sosial yang nyata, sudah pasti kebijakan ini tidak akan bertahan lama dan akan digantikan dengan kebijakan yang lebih solutif dalam menghadapi dinamika sosial kemasyarakatan. Maka dari itu dalam mendesain produk kebijakan pendidikan khususnya pendidikan tinggi keagamaan Islam perlu diperhatikan: pertama lingkungan sosial perguruan tinggi, kedua sumber daya manusia yang dimiliki perguruan tinggi, dan ketiga yaitu potensi kelemahan dan keunggulan dengan pertimbangan ini produk kebijakan akan berjalan sesuai dengan target yang diharapkan.

Lingkungan sosial mempunyai andil yang besar sebagai landasan dalam meramu suatu produk kebijakan. Jika kita melihat fakta yang ada di lapangan hal yang lebih urgen dibandingkan dengan moderasi beragama untuk saat ini ialah moderasi dalam bidang perekonomian. Hal ini berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik BPS pada tahun 2020 angka kemiskinan naik menjadi 10,19 persen, meningkat 0,14 persen poin terhadap Maret 2020 dan meningkat 0,97 persen terhadap September 2019. Ini artinya ada peningkatan yang cukup signifikan terhadap angka kemiskinan di Indonesia, hal ini juga berarti akan mengganggu stabilitas iklim sosial dan memicu krisis yang akan berdampak pada kekerasan dan tindakan kriminal lainnya.

### **C. Penutup**

Disertasi ini memiliki keterbatasan dan kekurangan dari berbagai aspek, maka dari itu peneliti sangat mengharapkan masukan dan kritikan konstruktif untuk melengkapi dan menyempurnakan tema penelitian ini di masa yang akan datang. Terutama dalam aspek dampak sosial kemasyarakatan yang ada, karena keterbatasan peneliti untuk mengakses dampak sosial yang ditimbulkan secara nyata dari kebijakan moderasi beragama di perguruan tinggi keagamaan Islam, dari celah ini harapan penulis disertasi ini menjadi suatu karya yang dapat berkembang dan diteliti untuk masa yang akan datang. Semoga karya yang amat sederhana ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan akademisi yang menekuni dalam bidang yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Arnida. "Malaysian Higher Education and the United States as a Model: Policy Borrowing or Policy Learning?," 2013. <http://minerva-access.unimelb.edu.au/handle/11343/54683>.
- Abbas, Moh Rafli. "RUANG PUBLIK DAN EKSPRESI POLITIK IDENTITAS: (Studi Tentang Pergulatan Identitas Ke-Papua-an di Yogyakarta)." Text. Serial. *Journal Society*, June 1, 2016. <https://doi.org/10.33019/society.v4i1.33>.
- Abdullah, Idi. *Sosiologi Pendidikan, Individu, Masyarakat, Dan Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Abdullah, M.Amin. *Transformasi IAIN Sunan Kalijaga Menjadi UIN Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Abror, Darul. "POLITIK PENGUATAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ISLAM INDONESIA." *Conciencia* 18, no. 2 (December 30, 2018): 28–42. <https://doi.org/10.19109/conciencia.v18i2.3060>.
- Afala, Laode Machdani. *Politik Identitas Di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press, 2018.
- Agung, Iskandar, and Agus Santoso. "Dinamika LPTK Menuju Perguruan Tinggi Kelas Dunia (World Class University/WCU)." *Perspektif Ilmu Pendidikan* 31, no. 1 (April 2017): 42–54.
- A Kadir, Muslim. "TEKNIK KEBERAGAMAAN INDONESIA (TINGKAT DASAR)." Pusat Kajian Ilmu Islam Terapan dan Moderasi Beragama, 2020.
- Akhmadi, Misyroh. "Sosio-Historis Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Era Orde Baru." *LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan)* 4, no. 2 (November 14, 2016): 189–98. [https://doi.org/10.21927/literasi.2013.4\(2\).189-198](https://doi.org/10.21927/literasi.2013.4(2).189-198).
- AL Yahya, Eid. "Moderation in the Kingdom of Saudi Arabia: An Analysis of 'Pragmatist' and 'Puritanical' Discourses." *Dissertation*, University of Exeter, 2011.
- Ali-Fauzi, Ihsan, and Rizal Rizal Panggabean. *Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta: Democracy Project dan Yayasan Abadi Demokrasi, 2009.

- Anne McCarthy, Rachel. "The Controversial Moderate: Tariq Ramadan's Vision for Muslim Political Participation in Europe." University of Melbourne, 2011.
- Ancok, Djamaludin. *Peran Perguruan Tinggi Dalam Menyiapkan Manusia Di Milenium Ketiga*. Yogyakarta: UII Press, 1998.
- Anderson, James E. *Public Policy Making: An Introduction*. Boston: Wadsworth Cengage Learning, 1994.
- Anwar, Mohammad Emnis. "MENELUSURI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 05 (June 13, 2017). <https://doi.org/10.30868/ei.v3i05.43>.
- Arafah, Sitti. "Moderasi Beragama: Pengarusutamaan Kearifan Lokal Dalam Meneguhkan Kepelbagaian (Sebuah Praktik Pada Masyarakat Plural)." *MIMIKRI* 6, no. 1 (2020): 58–73.
- Arend van Klinken, Gerry. *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal Dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007.
- Arif, Mahmud. *Moderasi Islam Dan Kebebasan Beragama Perspektif Mohamed Yatim & Thaha Jabir Al-Alwani*. Yogyakarta: Deppublish, 2020.
- Arifin, Anwar. *Politik Pendidikan Tinggi Indonesia*. Jakarta: Pustaka Indonesia, 2013.
- Asrori, Mohammad. "POLITIK DAN PENDIDIKAN (Tinjauan Historis Pengaruh Kebijakan Politik Terhadap Sistem Pendidikan di Indonesia)." *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (December 30, 2015). <https://doi.org/10.18860/jpai.v2i1.3762>.
- Asrohah, Hanun. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos, 1999.
- As Hornby. *Oxford Advanced Dictionary of Current English*. Great Britain: Oxford University Press, 1987.
- Astuti Buchari, Sri. *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Assegaf, Abdurrachman. *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam Dari Pra-Proklamasi Ke Reformasi*. Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005.



- Azra, Azyumardi. "Resonansi Azyumardi Azra." *Republika.co.id*. Kamis Desember 2015.
- Azwar, Syaifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Baedowi, Ahmad. "POLITIK PENDIDIKAN ATAU PENDIDIKAN TAK BERPOLITIK?" *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 3, no. 4 (April 22, 2017). <https://doi.org/10.32729/edukasi.v3i4.228>.
- Baidi. "Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Berbasis Multikultural Dalam Membentuk Sikap Harmoni." IAIN Surakarta, 2020.
- Baharudin dkk. *Reorientasi Tradisi Perguruan Tinggi Islam Menuju World Class University*. Malang: UIN Malang Press, 2014.
- Biddle, Ian. *Music and Identity Politics*. New York: Routledge, 2016.
- Biyanto. "Antara Deradikalisasi Dan Moderasi Perspektis Filsafat Kritik Ideologi." Surabaya – Indonesia, n.d.
- BIDANG AKADEMIK DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA. "BUKU PANDUAN AKADEMIK TAHUN AKADEMIK 2020/2021." IAIN Surakarta, 2020.
- Bogdan, Robert, and Sari Knop Biklen. *Qualitative Research For Education: And Introduction to Theories and Methods*. Boston: Allyn and Bacon, 1992.
- Boardman, Anthony E, David Greenberg, Aidan R. Vining, and David L Weimer. *Cost-Benefit Analysis: Concept and Practice*. New Jersey: Prentice-Hall, 1996.
- Bowie, Fiona. *The Anthropology of Religion*. Oxford: Blacwell Publishing, 2001.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2007.
- Burhanudin, Nunu, and Khairudin. "Desiminasi Hasil Penelitian Unggulan BOPTN Tahun 2019, Dengan Judul Kontekstualisasi Pendidikan Multikultural Di PTKIN, Deradikalisasi Agama Melalui Kebijakan Akademik Dan Transmisi Nilai-Nilai Budaya Di IAIN Bukit Tinggi, UIN Jakarta, UIN Malang, Dan IAIN Tulungagung," 2021.



- Charles H. Jr., Bishop. *Making Change Happen One Person at a Time: Assessing Change Within your Organization*. New York: AMACOM, 2001.
- Crick, Bernard. *In Defense of Politics*. New York: Continuum Publishing, 2010.
- Croissant, Aurel. "From Transition to Defective Democracy: Mapping Asian Democratization." *Democratization* 11, no. 5 (2004).
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- David, Beetham. "The Quality of Democracy: Freedom as the Foundation." *Journal of Democracy*, 4, 2004.
- Daulay, Haidar Putra. *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- . *Sejarah Pertumbuhan Dan Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Departemen Agama RI. *Sejarah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tahun 1976 Sampai 1980*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1986.
- Dhofier, Zamarkhsari. *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenal Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2011.
- Dill, David D., Maarja Beerkens (auth.), David D. Dill, and Maarja Beerkens (eds.). *Public Policy for Academic Quality: Analyses of Innovative Policy Instruments*. 1st ed. Higher Education Dynamics. Springer Netherlands, 2010.
- Dian Indraswari, Yosephine. *To Facilitate Dialogue, To Nurture Diversity*. Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, 2019.
- Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama. *Moderatisme Islam*. Jakarta, 2019.
- Diye, Thomas R. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice-Hall, 1981.
- Dun, William N. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2002.

- Duderstadt, James. *A University for the 21st Century*. The University Michigan, 2003.
- Effendy, Bachtiar. *Islam Dan Negara: Transformasi Gagasan Dan Praktik Politik Islam Indonesia*. Jakarta: Democracy Project, 2011.
- Esha, Muhammd In'am. *Institutional Transformation Reformasi Dan Modernisasi Pendidikan Tinggi Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Fadjar, Malik. *Reorientasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Fadjar Dunia, 1999.
- Fahri, Mohamad, and Ahmad Zainuri. "Moderasi Beragama Di Indonesia." *Intizar* 25, no. 2 (2019): 95–100.
- Fattah, Nanang. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013.
- Fukuyama, Francis. *Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment*, 2018. <https://www.overdrive.com/search?q=11BB3B12-2608-4E88-B335-985996CB96E7>.
- Foucault, Michel. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, Trans A. Sheridan. Harmonsworth: Peregrine, 1977.
- . *Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age Reason*. New York: Vintage Book, 1988.
- . *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings. 1972-1977*. C Gordon (Ed). Brighton: Harvester, 1980.
- . *The Archeology of Knowledge and Discourse on Language*. New York: Pantheon Books, 1972.
- Gardiner, Mayling Oey. *ERA DISRUPSI Peluang Dan Tantangan Pendidikan Tinggi Indonesia*. Jakarta: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2017.
- Guibernau, Montserrat. *The Identity of Nations*. Cambridge, UK: Polity Press, 2007.
- Hadi, Amirul, and Haryono. *Metode Penelitian Pendidikan 2*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

- Hanani, Silfia. *Sosiologi Pendidikan Keindonesiaan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
- Hardiman, F Budi. *Filsafat Modern*. Jakarta: Gramedia, 2007.
- Hardiyansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Hasbullah, Moeflich. *Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam*. Bandung: Fokusmedia, 2003.
- Hasbiyallah, Hasbiyallah, Moch Sulhan, Heri Khoiruddin, and Undang Burhanudin. "Memotret Wajah Islam Melalui Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Indonesia." *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 17, no. 2 (December 27, 2019): 227–44. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v17i2.3216>.
- Hashim Kamali, Mohammad. *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah*. USA: Oxford University Press, 2015.
- Hall, Stuart. *Cultural Identity and Diaspora*", in Jonathan Rutherford (Ed.) *Identity: Community, Culture, Difference*. London: Lawrence & Wishart, 1990.
- Halligan, J, and M Turner. *Profiles of Government Administration in Asia*. Canberra: Australian Government Publishing Service, 1995.
- Hamdi, Muchlis. *Kebijakan Publik, Proses Analisis, Dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Handayani, Suci. *Pelibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Partisipatif (Sebuah Pengalaman Di Solo)*. Surakarta: KOMPIP, 2008.
- Hashim Kamali, Mohammad. *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah*. USA: Oxford University Press, 2015.
- Heller, Agnes, and Sonja P Riekman. *Biopolitics: The Politics of The Body, Race and Nature*. California: Avebury, 1996.
- Heywood, Andrew. *Politics*. London: Palgrave Foundation, 2013.
- Hidayat, Aat, and Manijo. "Base Of Islamic Moderation in Serat Bonang and Establishment of Local Interests in Islamic Moderates of Rembang Muslim Communities." Kementerian Agama, 2019.

- Hidayat, Rahmad. *SINDANG JATI Multikultural Dalam Bingkai Moderasi*. Bengkulu: Literasiologi, 2019.
- Hilmy, Masdar. "Whiter Indonesia's Islamic Moderatism? A Rexamination on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU." *Journal Os Indonesian Islam* 07, no. 01 (June 2013).
- Huntington, Samuel, and Joan Nelson. *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Hendri, Hendri. "Kebijakan Politik Pendidikan Tinggi Pemerintah Kolonial Belanda Di Indonesia (1920-1942)." *Diakronika* 17, no. 1 (July 31, 2017): 32–44. <https://doi.org/10.24036/diakronika/vol17-iss1/14>.
- Hilmy, Masdar. *Teologi Perlawanan: Islamisme Dan Diskursus Demokrasi Di Indonesia Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Hidayat, Rahmad. *SINDANG JATI Multikultural Dalam Bingkai Moderasi*. Bengkulu: Literasiologi, 2019.
- Hidayat, Aat, and Manijo. "Base Of Islamic Moderation in Serat Bonang and Establishment of Local Interests in Islamic Moderates of Rembang Muslim Comunities." Kementerian Agama, 2019.
- Hilmy, Masdar. "The Politics of Retaliation: The Backlash of Radical Islamists against Deradicalization Project in Indonesia." *Al-Jami'ah* 51, no. 1 (2013).
- . "Whiter Indonesia's Islamic Moderatism? A Rexamination on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU." *Journal of Indonesian Islam* 07, no. 01 (June 2013).
- . "Mengawal Moderasi Beragama." *Kompas*, Desember 2019.
- Indra, Hasbi. "Pendidikan Tinggi Islam Dan Peradaban Indonesia." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 16 (June 24, 2016): 109. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i1.317>.
- Jabali, Fuad, and Jamhari. *IAIN Modernisasi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.
- Jabiri, M. Abid al-. *Agama, Negara Dan Penerapan Syariah, Terj, Mudjiburrohman*. Yogyakarta: Pustaka, 2001.

- J, Hasse, and Mustaqim Pabbajah. "Politik Pendidikan Indonesia:" *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 10, no. 1 (September 30, 2018): 49–60. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v10i1.267>.
- Kamal, Rahmat. "Internalization of Moderate Islamic Values in Education." *Islamic Studies Journal for Social Transformation*, June 13, 2017, 67–80. <https://doi.org/10.28918/isjoust.v1i1.1142>.
- Kamhing, Lee. *Education and Politics in Indonesia 1945-1965*. Kuala Lumpur: Universitas of Malaya Press, n.d.
- Kaiser, Frans, Leo Goedegebuure, Frans Kaiser, Leo Goedegebuure, Peter Maassen, Peter Maassen, Lynn Meek, Frans Van Vaght, and Egbert De Weert. *Higher Education Policy: An International Comparative Perspective. An International Comparative Perspective*. English language ed. Issues in Higher Education. Elsevier Ltd, Pergamon Press, 1994. <http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=8c5b3298348ee78efa3b4f7d3794e4b6>.
- Karami, Jahangi. "External Politics from the View of Social Constitutionalism" *Journal of Strategy*, 31 (2004).
- Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam*. Jakarta: Kementerian Agama, 2019.
- Kementerian Agama. *Radikalisme Agama Dan Tantangan Kebangsaan*. Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2014.
- Kementerian Agama. *Tanya Jawab Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Kemenag. *Renstra Pembangunan Pendidikan Islam 2010-2014*. Jakarta: Ditjen Pendis Kemenag, 2009.
- "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta," n.d.

- “Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 1997,” 1997.
- “Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2974 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Kuliah Kerja Nyata Moderasi Beragama,” n.d.
- Khisbiyah, dkk, Yayah. *Kontestasi Wacana Keislaman Di Dunia Maya Moderatisme, Ekstremisme, Dan Hipernasionalisme*. Surakarta: Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- King, Rogers. *Analyzing the Higher Education Regulatory State*. London: Centre For Analysis or Risk and Regulation, 2006.
- King, Victor, and William D. Wilder. *The Modern Anthropology of South-East Asia: An Introduction by Victor King*. Routledge, 2003.
- Kologlugil, Serhat. “Michel Foucault’s Archaeology of Knowledge and Economic Discourse”. *Erasmus Journal for Philosophy and Economics* 3, no. 2 (2010).
- Laurer Robert H. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Rineka, 2001.
- Laswel, Harold D. *Politics: Who Gets What, When and How*. New York-London: Whittlesey House, McGraw-Hill Book Co, 1936.
- Laswell, Harold, and Abraham Kaplan. *Power and Society*. New Heaven: Yale University Press, 1970.
- Lestari, Yeni Sri. “Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama.” *Journal of Politics and Policy* 1, no. 1 (2018): 19–30.
- Liddle, W. *Coercion, Co-Optation, and the Management of Ethnic Relations in Indonesia*. In M.E Brown & Ganguly, S. (Eds) *Government Policies and Ethnic Relations in Asia and the Pacific*. Harvard University: The Center For Science and International Affairs, 1997.
- Lodico, Marguerite G., Dean T, and Katherine H. Voegtler Spaulding. *Methods In Educational Research: From Theory to Practice*. San Francisco: Jossey-Bass, 2006.



- Mahfud, Choirul. *Politik Pendidikan Islam Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Mahmud. *Manajemen Pendidikan Tinggi Berbasis Nilai-Nilai Spiritualitas*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2019.
- Maikut, Pamela, and Richard Norehous. *Begining Qualitatif A Research Philoshopyand Practical Guide*. London: Washinton,dc, 1994.
- Maarif, Ahmad Syafii, Ahmad Syafii Maarif, Ihsan Ali-Fauzi, and Syamsu Rizal Panggabean. *Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Wakaf Paramadina, 2010.
- Madani, Muhlis. *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mahmud. *Moderasi Karakter Asli Agama Islam*. Yogyakarta: LKiS, 2020.
- Magnis Suseno, Frans. *Pemikiran Karl Marx; Dari Sosialisme Utopis, Ke Perselisihan Revisionis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Makki, Ismail. “Dinamika Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi.” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (December 31, 2016): 159–71. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v3i2.1150>.
- Miles, Mateew B, A.M Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods, Sourcebook, Third Edition*. Thousand Oaks, California: Sage Publication, inc, 2014.
- Minhaji, H. Akh. “Masa Depan Perguruan Tinggi Islam Di Indonesia (Perspektif Sejarah-Sosial).” *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (July 5, 2007). <https://doi.org/10.19105/jpi.v2i2.218>.
- Mohammad Kosim, Maimun. *Moderasi Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2019.
- Molan, Benyamin. *Glosarium Prentice Hall*. Jakarta: Prenhalindo, 2001.
- Moko, Haryatmoko. *Etika Politik Dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas, 2003.

- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.
- Muksin, Mumuh. “Perubahan Status Kelembagaan Perguruan Tinggi Agama Islam: Studi Perubahan Iain Menjadi Uin Dan Stain Menjadi Iain.” *Kelola : Jurnal Sosial Politik* 2, no. 2 (September 3, 2019): 70–84. <https://doi.org/10.15575/jk.v2i2.5820>.
- Mustafa, and Abdullah Aly. *Sejarah Pendidikan Islam Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Muzakki, Akh. “Pasar Pendidikan Islam Tantangan PTAI Di Era Globalisasi.” *Majalah Perta, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam*, 2006.
- Muzammil, As’ad. “Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan Dari Orde Lama Sampai Orde Baru (Suatu Tinjauan Historis).” *Potensia* 2, no. 2 (December 1, 2016): 183–98.
- Mujahidin, Akhmad. *Implementasi Moderasi Beragama Di Lingkungan PTKI*. Yogyakarta: LKiS, 2020.
- Muhajir, Afifudin. *Membangun Nalar Islam Moderat: Kajian Metodologis*. Situbondo: Tanwirul Afkar, 2018.
- Mujahidin, Akhmad. *Implementasi Moderasi Beragama Di Lingkungan PTKI*. Yogyakarta: LKiS, 2020.
- Munadi, Muhammad, and Barnawi. *Kebijakan Publik Di Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Musawar, Mualimin Mochammad Sahid, Ahmad Nur Jihadi, and Setiyawan Gunardi. “Moderate Islam as a Solution To Pluralism In The Islamic World: The Experience Of Indonesia.” *Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)*, November 29, 2019, 1–24.
- Mustaqim, Abdul. *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Nata, Abudin. *Sosiologi Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Nashir, Haedar. “Moderasi Indonesia Dan Keindonesiaan; Perspektif Sosiologi.” *Pidato Pengukuhan Gurubesar Di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (12 Desember 2019)*, 2019.

- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Erlangga, 1999.
- Neave, G, and F.A Vught. *Prometheus Bound; The Changing Relationship between Government and Higher Education in Western Europe*, Oxford: Pergamon Press. Oxford: Pergamon Press, 1991.
- Nisa, Maudlotun. “Politik pendidikan bahasa arab di perguruan tinggi : Analisis wacana atas Program Studi Bahasa Arab di UIN Jakarta dan UI,” May 2018. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41661>.
- Nizar, Samsul. *Sejarah Sosial Dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam Di Nusantara*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Nizar, Samsul. *Moderasi Agama; Memperkuat Fungsi Kekhalifahan Dalam Budaya Global*. Yogyakarta: LKiS, 2020.
- Nugroho, Riant. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- . *Public Policy*. Jakarta: Elex Media, 2009.
- . *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media, 2004.
- Ozolina, Zaneta. *Political Science: Changing, Overlapping and Interacting Identities*. Riga, Latvis: Latvijas Universitate, 2005.
- Parsons, Talcott. “A Functional Theory of Change” *Dalam Eva Etzioni Haevly Dan Amital Etzioni Social Chane: Sources, Patters, and Consequences*. New York: Basic Book, 1994.
- Pairin, Pairin. “SEJARAH PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM.” *Shautut Tarbiyah* 18, no. 2 (November 1, 2012): 116–41. <https://doi.org/10.31332/str.v18i2.79>.
- “Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pedndidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,” n.d.
- “Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1985 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri,” n.d.
- “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia,” n.d.

- “Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020, Tentang RENCANA Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024,” n.d.
- Plank, David N, and William Lowe Boyd. *Antipolitics, Education, and Institutional Choice: The Flight From Democracy*. USA: Sage Publication, 1994.
- Prasojo, Zaenuddin Hudi, Elmansyah Elmansyah, and Muhammed Sahrin Haji Masri. “Moderate Islam and the Social Construction of Multi-Ethnic Communities in the Hinterland of West Kalimantan.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no. 2 (December 25, 2019): 217–39. <https://doi.org/10.18326/ijims.v9i2.217-239>.
- Priyono, Onny S, and A.W.M. Pranarka. *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan, Dan Implementasi*. Jakarta: CSIS, 1996.
- Qasim, Muhammad. *Membangun Moderasi Beragama Umat Melalui Integrasi Keilmuan*. Makasar: Alauddin University Press, 2020.
- Qardhawi, Yusuf al-. *Fiqh Al-Wasthiyyah al-Islamiyah Wa Al-Tajdid*. Mesir: Markaz al-Tiba’ah li al-Qardhawi, 2009.
- Qostulani, Muhamad. *Moderasi Beragama: Jihad Ulama Menyelamatkan Umat Dan Negeri Dari Bahaya Hoax*. Tangerang: PSP Nusantara, 2019.
- Qomar, Mujamil. *Dimensi Manajemen Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- . *Manajemen Pendidikan Islam Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- . *Moderasi Islam Indonesia*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- Rabinow (ed), Paul. *The Foucault Reader: An Introduction to Foucault’s Thought with Major New Unpublished Material*. New York: Pantheon Books, 1984.
- Rakhmad. *Teori Administrasi Dan Manajemen Publik*. Jakarta: Pustaka Arif, 2009.
- Rahim, Husni. *Arah Baru Pendidikan Islam Indonesia*. Jakarta: Logos, 2001.
- Ristekdikti. *Statistik Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Annual Publication, 2018.

- Ritzer, George, and Douglas J Goodman. *Teori Sosiologi, Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Keasi Wacana, 2010.
- Roqib, Moh. *Ilmu Pendidikan Islam, Pengembangan Pendidikan Integratif Sekolah, Keluarga, Dan Masyarakat*. Yogyakarta: LKiS, 2009.
- Rozi dkk, Syafuan. *Politik Identitas: Problematika Dan Paradigma Solusi Keetnisan versus Keindonesiaan Di Aceh, Raiiau, Bali, Dan Papua*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Russell, Bernard. *Research Methods in Anthropology*. London- New Delhi: Sage Publication, 1994.
- Rusydiyah, Evi Fatimatur. "Analisis Historis Kebijakan Pendidikan Islam Kementerian Agama Ri Masa Kh.A.Wahid Hasyim." *Al - Ibrah* 2, no. 1 (June 30, 2017): 1–31.
- Rohmat Rosyadi, Abdu. *Penguatan Regulasi Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan: Jihad Regulasi Dalam Membangun Moderasi Islam*. Bandung: Pustaka Senja, 2020.
- Rokhmad, Abu. "Radikalisme Islam Dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 20, no. 1 (2012): 79–114.
- S, Nasution. *Metode Peneltian Naturalistik*. Bandung: Tarsito, 1998.
- Salem, Yasmin. "Transnational Islamism And Political Moderation: A Comparative Analysis Of Egypt And Morocco." Dissertation, Florida Atlantic University, 2015.
- Sanger, Catherine Shea, and Nancy W. Gleason, eds. *Diversity and Inclusion in Global Higher Education: Lessons from Across Asia*. Singapore: Springer Singapore, 2020. <https://doi.org/10.1007/978-981-15-1628-3>.
- Sarnoto, Ahmad Zain. "Konsepsi Politik Pendidikan Di Indonesia." *Educhild: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya* 1, no. 1 (2012): 30–40.
- Salik, Mohamad. *Nahdlatul Ulama Dan Gagasan Moderasi Islam*. Malang: Literindo Berkah Jaya, 2020.



- Salik, Mohammad. "Conserving Moderate Islam in Indonesia an Analysis of Muwafiq's Speech on Online Media." *Journal of Indonesian Islam* 13, no. 02 (2019).
- Schulte Nordholt, Henk. *Decentralization in Indonesia: Less State, More Democracy? In Politicizing Democracy*. Springer, 2005.
- Setyobudi, Imam. "Politik Identitas Animal Pop Dance: Subbudaya Dan Gaya Hidup Hibrid." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 12, no. 1 (December 7, 2017): 55–70. <https://doi.org/10.14421/jsr.v12i1.1286>.
- Shihab, M. Quraih. *Wasathiyah, Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*. Jakarta: Lentera Hati, 2020.
- Shukri Hanapi, Mohd. "The Wasatiyyah (Moderation) Concept in Islamic Epistemology: A Case Study of Its Implementation in Malaysia." *International Journal of Humanities and Social Science* 4, no. 9 (1) July (2014).
- Sirozi, M. *Politik Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- . *M. Politik Pendidikan Dinamika Hubungan Antara Kepentingan Kekuasaan Dan Praktek Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- , *Politik Pendidikan Di Indonesia: Peran Tokoh-Tokoh Islam Dalam Penyusunan UU No. 2/1989*. Diterjemahkan Oleh Lilian D. Jakarta: INIS, 2004.
- . "Globalization and Internationalization of Higher Education System: Some Challenges and Opportunities for Islamic Higher Education Institutions in Indonesia." In *International Seminar on The Direction of the Development of Islamic Higher Education Institutions in Responding Global Challenges and Opportunities*. Palembang, 2007.
- Snow, David A, and Robert D Benford. "Ideology, Frame Resonance, and Participant Mobilization." *International Social Movement Research*, 1988.
- Spradley, James P. *Participant Observation*. New York: Holts, Rinehart and Winston, Pub. Inc, 1980.
- Strauss, Anselm, and Juliet Corbin. *Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. California: Sage Publication, 1998.



- Steenbrink. *Pesantren, Madrasah, Sekolah ; Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES, 1994.
- Soeharto. *Pikiran, Ucapan Dan Tindakan Saya*. Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Persada, 1989.
- Subhi, Muhammad. *Promosi Toleransi & Moderasi Beragama*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2019.
- Suharsaputra, Uhar. *Manajemen Pendidikan Perguruan Tinggi*. Bandung: Reflika Aditama, 2015.
- Suharto, Babun. *Moderasi Beragama Dari Indonesia Untuk Dunia*. Yogyakarta: LKiS, 2019.
- Suryadi Bakry, Umar. *Multikulturalisme & Politik Identitas Dalam Teori Dan Praktik*. Bandung: Rajawali Pres, 2020.
- Suryana, Yaya, and A Rusdiana. *Pendidikan Multikultural, Suatu Upaya Penguatan Jati Diri Bangsa; Konsep, Prinsip Dan Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Suharsaputra, Uhar. *Manajemen Pendidikan Perguruan Tinggi*. Bandung: Reflika Aditama, 2015.
- Suheri, Suheri. "Refleksi Historis Konversi Sti Ke Uin." *Tarbiyatuna (e-Journal)* 7, no. 1 (February 15, 2014): 1–19.
- Sujak, Sujak. *Politik Kelembagaan Pendidikan Islam: Belajar Dari Masa Orde Baru*. Program Pascasarjana IAI Al Khoziny, 2015.
- Sumarto. "Perkembangan Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia." *Thaqafyyat: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam* 18, no. 1 (2017): 107–27.
- Suminto, Aqib. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES, 1984.
- Suprayogo, Imam. *Universitas Islam Unggul (Refleksi Pemikiran Pengembangan Kelembagaan Dan Reformulasi Paradigma Keilmuan Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. *Api Sejarah Mahakarya Perjuangan Ulama Dan Santri Dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jilid Kedua*. Bandung: Surya Dinasti, 2016.
- Sutrisno. *Pembaharuan Pengembangan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Fadilatama, 2011.

- Suharto, Toto. "Remoderasi Pendidikan Islam Di Indonesia: Tantangan Ideologis." *Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Filsafat Pendidikan Islam IAIN Surakarta*, February 20, 2020.
- Sukarieh, Mayssoun, and Stuart Tannock. "The Deradicalisation of Education: Teror, Youth and the Assault on Learning." *Race & Class* 57, no. 4 (2016).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suharto, Babun. *Moderasi Beragama Dari Indonesia Untuk Dunia*. Yogyakarta: LKiS, 2019.
- Suharto, Toto. "Remoderasi Pendidikan Islam Di Indonesia: Tantangan Ideologis." *Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Filsafat Pendidikan Islam IAIN Surakarta*, February 20, 2020.
- Sukarieh, Mayssoun, and Stuart Tannock. "The Deradicalisation of Education." *Journal Terror, Youth and the Assault on Learning* 57, no. 4 (2016).
- Sumarto. "PERKEMBANGAN POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA." *THAQAFIYYAT: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam* 18, no. 1 (2017): 107–27.
- Susetyo, Benny. *Politik Pendidikan Penguasa*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Suharto, Babun. *Moderasi Beragama Dari Indonesia Untuk Dunia*. Yogyakarta: LKiS, 2019.
- Suharto, Toto. "Remoderasi Pendidikan Islam Di Indonesia: Tantangan Ideologis." *Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Filsafat Pendidikan Islam IAIN Surakarta*, February 20, 2020.
- Syaiful, Ach. "Politik Pendidikan Islam Masa Reformasi." *Al Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan* 2, no. 1 (March 21, 2018): 134–54.
- Syamsyurijal. *Kekuasaan Agama Dan Identitas*. Yogyakarta: LIntas Nalar, 20119.
- Syaiful, Ach. "Politik Pendidikan Islam Masa Reformasi." *Al Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan* 2, no. 1 (March 21, 2018): 134–54.

- Syaiful, Bahri. "Pendidikan Islam Masa Orde Lama (Refleksi Historis Tentang Dinamika, Kebijakan, Dan Tokoh)." *AL FALAH* 13, no. 24 (2013): 251–69.
- Syarif, M. "Politik Pendidikan Jepang Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia." *TARBIYA ISLAMIA : Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* 8, no. 2 (August 25, 2019): 247–66. <https://doi.org/10.36815/tarbiya.v8i2.477>.
- Syafar, Djunawir, Firman Sidik, M. Rifan Panigoro, Dian Adi Perdana, Arfan Nusi, Sitti Rahmawati Talango, Habibie Yusuf, Abdur Rahman Adi Saputra, Andiani Rezkita Nabu, and Rifadli D. Kadir. *Rumah Moderasi Beragama: Perspektif Lintas Keilmuan*. CV. Bening Pustaka, 2019.
- Syukur, Abdul. "Islam, Etnisitas Dan Politik Identitas: Kasus Sunda." *Dalam Miqot (Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman)* 35, no. 2 (2011).
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Tan, Charle. *Philosophical Reflection for Educator*. Singapore: Cengage Learning, 2008.
- Tayeb, Osama, Adnan Zahed, and Jozef Ritzen, eds. *Becoming a World-Class University*. Cham: Springer International Publishing, 2016. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-26380-9>.
- Thaler, RH, and C Sunstein R. *Libertarian Paternalism Is Not an Oxymoron*. Chicago: University of Chicago Law Review, 2003.
- Thoha, Mohammad. "POLITIK PENDIDIKAN ISLAM (Potret Sejarah Periode Klasik Sampai Abad Pertengahan)." *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (January 2, 2014): 20–37. <https://doi.org/10.19105/jpi.v8i1.381>.
- Thomton, Sarah. *Club Cultures: Music, Media and Subculture Capital*. Cambridge: Polity Press, 1995.
- Thoolen, Hans. *Indonesia and the Rule of Law: Twenty Years of "New Order" Government: A Study*. London: Pinter Pub Ltd, 1987.
- Tilaar, H.A.R, and Riant Nugroho. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

- Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Gedung Kementerian Agama RI, 2019.
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Gedung Kementerian Agama RI, 2019.
- Tolchah, Moch. *Dinamika Pendidikan Islam Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: LKiS, 2015.
- Travers, Max. *Qualitative Interviewing Methods, Dalam Maggie Walter (Ed) Sosial Research Methods, Second Edition*. New Zealand: Oxford University Press, 2010. Automatic citation updates are disabled. To see the bibliography, click Refresh in the Zotero tab. Uribe Correa, Lina. "Access to Higher Education in Colombia| An Assessment of Public Policy and Outcomes." State University of New York at Albany, 2013. <http://oatd.org/oatd/record?record=oai%5C%3A3552945.proquest.com%5C%3A3552945>.
- Wahyono, Andi. "Kebijakan Pendidikan Islam: Hibridasi Lembaga Pendidikan Tinggi." *Jurnal Pendidikan Islam* III, no. 1 (2014): 115–34.
- Walsh, John. *Higher Education in Ireland, 1922–2016: Politics, Policy and Power—A History of Higher Education in the Irish State*. 1st ed. Palgrave Macmillan UK, 2018. <http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=712bb518ddc9b4b473441f6ce1513cb9>.
- Winarno, Budi. *Teori Dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Medpres, 2005.
- Wildan, dkk, Muhammad. *Menanam Benih Di Ladang Tandus Potret Sistem Produksi Guru Agama Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: CISForm Center for the Study of Islam and Social Transformation Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2019.
- Yahya, Amiruddin. "DINAMIKA LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI ISLAM DI INDONESIA." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 41 (December 20, 2017). <https://doi.org/10.30821/miqot.v41i1.314>.

- Yunus Marukhin, Muhammad. *Menjadi Muslim Moderat Teologi Asy'ariyah Di Era Kontemporer*. Yogyakarta: Mirra Buana, 2020.
- Yusuf dkk. *Kaleidoskop Kementerian Agama Republik Indonesia 1946-2016 Jejak Langkah Dari Masalalu*. Jakarta: Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Balitbang dan Diklat Kementerian Agama, 2017.
- Zubaedi. *Isu-Isu Baru Dalam Diskursus Filsafat Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Zurqoni. *Meretas Peran Perguruan Tinggi Refleksi Atas Idealitas Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.

